



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan RUPM serta guna mendorong peningkatan penanaman modal berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun RUPMP;
- b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, RUPMP disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat BKPM Provinsi adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat Kepala BKPM Provinsi adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat IPM Kabupaten/Kota adalah Instansi Penanaman Modal di Kabupaten/Kota se- Nusa Tenggara Timur.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Nusa Tenggara Timur.
11. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
12. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang di tingkat Kabupaten/Kota yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RUPMP NTT Tahun 2016 – 2025.
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ASAS, TUJUAN, VISI, MISI DAN SASARAN

BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

BAB V PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMP

BAB VI PELAKSANAAN

LAMPIRAN

- A. Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - B. Isu Strategis Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - C. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - D. Rencana Fasilitasi Realisasi Proyek Penanaman Modal yang Strategis dan cepat menghasilkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - E. Peta Kawasan Pengembangan Investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - F. Potensi dan Komoditi Unggulan per Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Kepala BKPM Provinsi melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal Kabupaten/Kota dan

pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Nusa Tenggara Timur.

- (2) Dalam rangka penyusunan RUPMK, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan/atau BKPM Provinsi.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif yang tercantum dalam Dokumen RUPMP.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada arah kebijakan Gubernur dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (4) Pelaksanaan RUPMP dievaluasi secara berkala oleh Kepala BKPM Provinsi dengan melibatkan SKPD terkait, Instansi Vertikal di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2016

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


✓ **FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2016

✓ SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ✓


✓ **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 Pebruari 2016

BAB I

PENDAHULUAN

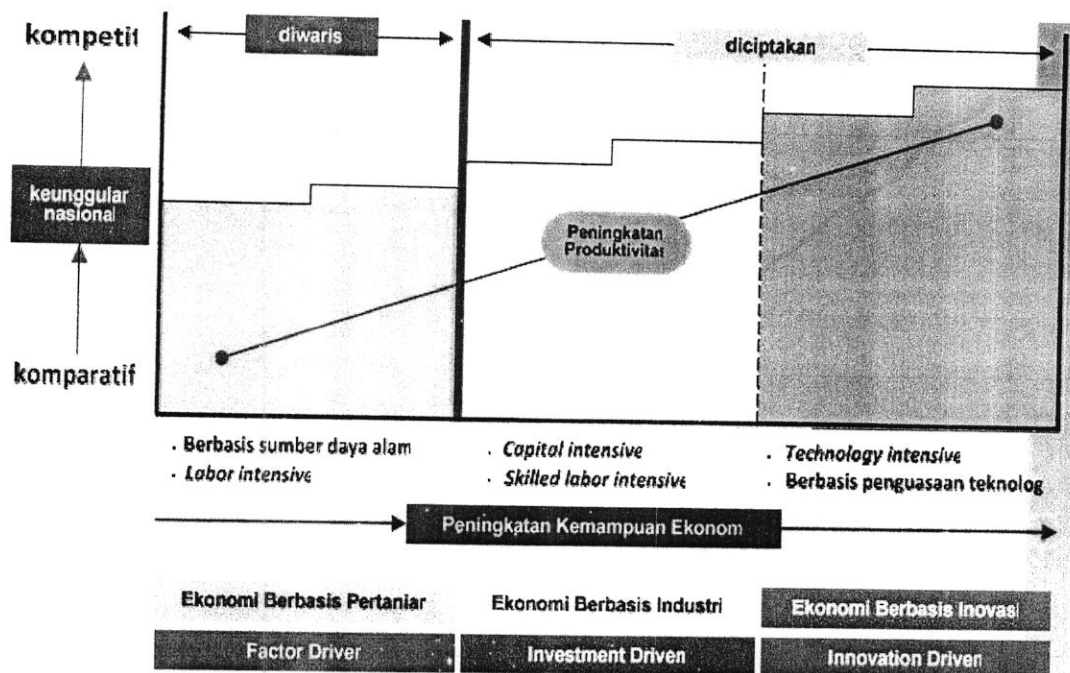
1.1. Latar Belakang

Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru bagi perluasan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Melalui peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi kapital domestik maupun luar negeri, akan menjadi faktor pengungkit yang sangat dibutuhkan bagi suatu negara dalam menggerakkan mesin ekonomi sebagai pengawal pertumbuhan yang berkelanjutan, karena pada hakekatnya kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat (Sadono Sukirno, 2000).

Peningkatan investasi diharapkan akan berperan sebagai medium transfer teknologi dan manajerial yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap meningkatnya produksi dan produktivitas serta daya saing ekonomi suatu bangsa. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan ke kondisi yang lebih baik.

Strategi dan arah kebijakan makro penanaman modal, selain harus dapat menangkap dinamika dan perubahan aspirasi pembangunan nasional, juga perlu memiliki prioritas yang jelas, serta memahami kebutuhan penanam modal. Dua hal yang disebut terakhir ini sangat penting karena kita tidak menginginkan yang terjadi adalah bahwa aktivitas penanaman modal hanya sekedar tumbuh secara organik. Justru sebaliknya, dalam operasionalisasinya arahan makro di atas paling tidak dapat memberikan indikasi pengembangan dari cabang bidang-bidang usaha dan lokasi prioritas, yang selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis pembangunan nasional dan daerah dalam bentuk investasi.

Gambar 1.1
Mengubah Keunggulan Komparatif Menjadi Keunggulan Kompetitif



Kegiatan investasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal, proses alih teknologi dan manajemen, serta manfaat bagi investor lokal. Manfaat yang paling menonjol adalah berkembangnya kolaborasi yang saling menguntungkan antar investor asing dengan kalangan pebisnis lokal, bisnis dan industri komponen berkembang dengan pesat, termasuk berbagai kegiatan usaha yang berorientasikan ekspor.

Melalui semangat pemberian otonomi yang luas kepada daerah dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat, maka masing-masing pemerintah daerah didorong dan diberi peluang untuk bisa mandiri dan secara bertahap melepaskan diri dari ketergantungan pada pemerintah pusat maupun daerah lainnya yang berkaitan dengan keuangan, penyediaan kebutuhan rakyat serta perencanaan kebijakan strategis, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan lainnya.

Otonomi daerah sendiri, merupakan suatu arah kebijakan yang dituangkan di dalam Pasal 1, angka (6), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Imbas dari kebijakan otonomi daerah tersebut terlihat pada kapabilitas masing masing daerah otonom untuk mau dan mampu menetapkan kebijakan implementatif yang pro rakyat, dan mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi daerah agar memiliki nilai tambah dan keunggulan komparatif baik secara politis, sosial, ekonomis, dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Salah satu upaya peningkatan potensi daerah untuk memiliki keunggulan dan nilai tambah secara ekonomis adalah melalui penanaman modal dengan pemahaman utama bahwa pihak ketiga (domestik dan asing) diberi peluang seluas-luasnya untuk secara proaktif membangun kerjasama untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi dengan menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang memiliki keunggulan.

Untuk menarik minat para investor supaya menanamkan modal di NTT maka diperlukan arah dan kebijakan perencanaan penanaman modal yang jelas dan terukur dalam jangka waktu tertentu yang termuat dalam bentuk suatu dokumen yang disebut Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025 dan berfungsi untuk mensinergikan dan

mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan skala prioritas sektor-sektor produksi yang akan dikembangkan. Pemerintah Provinsi NTT dalam proses penyusunan RUPMP selain mengacu pada RUPM nasional sesuai Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2012, juga mengacu pada prioritas pengembangan potensi Provinsi NTT seperti RPJP NTT 2005 – 2025, RTRW Provinsi NTT, serta dokumen perencanaan jangka panjang lainnya.

Rencana Umum Penanaman Modal NTT menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas, masing-masing sektor pangan dan hasil bumi, sektor infrastruktur, dan sektor energi. Pengembangan sektor-sektor prioritas diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal, regional dan nasional, pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan potensi daerah, serta peningkatan ketersediaan dan penggunaan sumber energi baru yang ramah lingkungan. Hal ini tidak menutup adanya upaya pengembangan sektor prioritas lainnya yang telah ada dan dikembangkan di daerah. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar Penanaman Modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM). Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

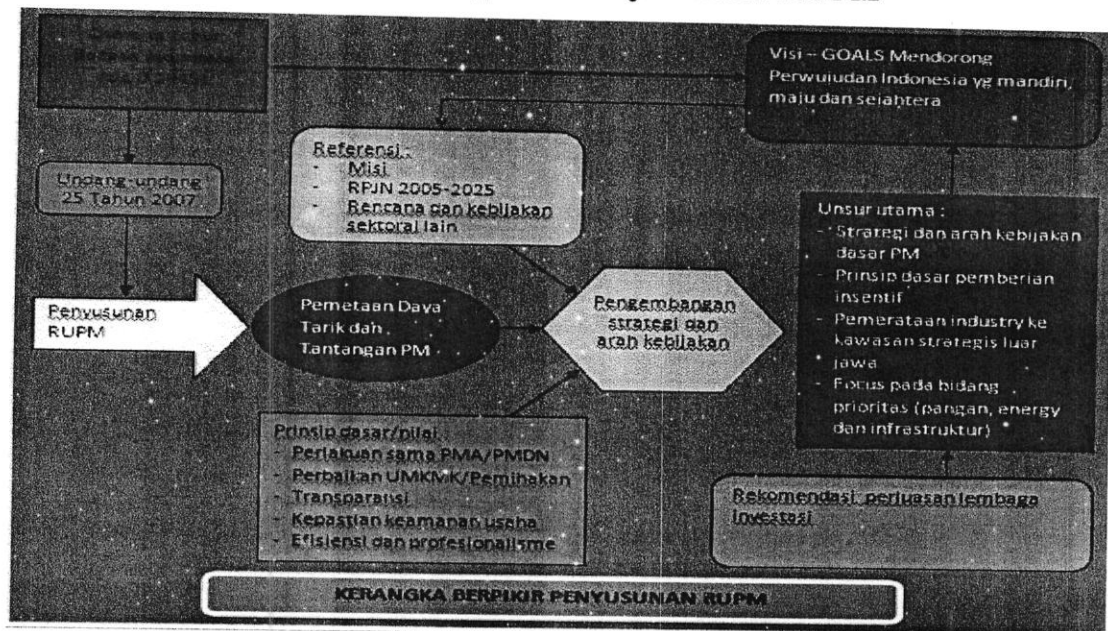
Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing global, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai

tambah, peningkatan aktivitas Penanaman Modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang Penanaman Modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam kegiatan promosi.

Gambar 1.2.

Kerangka Berpikir Penyusunan RUPM



1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RUPM Provinsi NTT ini didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional;
22. Peraturan Pemerintah 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan RUPMP dan RUPMK;
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. Hubungan RUPMP dengan Dokumen Perencanaan lain

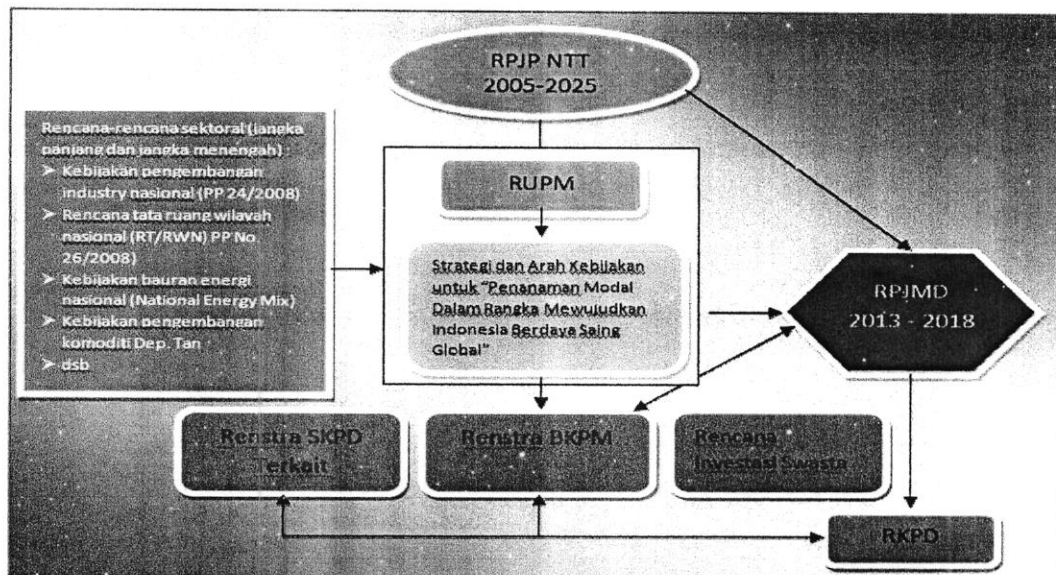
Sebagai suatu rencana umum, RUPMP Provinsi NTT berisi butir-butir strategis mengenai arah investasi (penanaman modal) di Provinsi NTT. Arah investasi tersebut meliputi arah kebutuhan investasi, arah promosi investasi dan arah fasilitasi investasi. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (sampai dengan 15-20 Tahun) yang terkait dengan dokumen pembangunan lainnya.

Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintah daerah dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 25 tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan. Oleh karena itu visi, misi dan arah pembangunan dalam RPJPD Provinsi NTT tersebut kemudian diuraikan dalam suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

periode 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014; dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat NTT yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan itu, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh di Provinsi NTT.

Gambar 1.3.
Hubungan RUPMP dengan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Lain



1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RUPM Provinsi NTT mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut :

- a. Pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan Penanaman Modal Provinsi;
- b. Pembahasan terkait dengan roadmap (peta panduan) implementasi RUPMP, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan; dan

- c. Terkait dengan rencana fasilitasi program yang strategis dan cepat menghasilkan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan naskah RUPMP NTT sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab II Asas, Tujuan, Visi, Misi Dan Sasaran, Bab ini terdiri atas uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPMP NTT dan manfaat serta tujuannya.

BAB III Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bab ini memuat tentang gambaran umum, kondisi makro ekonomi dan investasi, penduduk dan tenaga kerja, sarana prasarana dan aksesibilitas, kekayaan sumber daya alam, kerangka institusi pengambilan kebijakan serta tantangan investasi di Provinsi NTT.

BAB IV Arah Kebijakan Penanaman Modal Provinsi NTT, Bab ini berisikan hasil analisis SWOT yang disajikan dengan memperhatikan potensi dan realitas investasi di Nusa Tenggara Timur yang kemudian memuat gambaran mengenai arah operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan data-data yang ada.

BAB V Peta Panduan, Bab ini Memuat penyusunan Roadmap investasi NTT sampai dengan 2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam fase percepatan, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB VI Pelaksanaan, Bab ini Memuat langkah-langkah konkrit dalam pelaksanaan RUPM Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

ASAS, TUJUAN, VISI, MISI DAN SASARAN

2.1. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar 10 (sepuluh) asas : (kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara/asal daerah, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian). Serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal yaitu :

- a. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri;

Investasi akan menciptakan multiplier effect, antara lain munculnya kegiatan pendukung, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, kemandirian industri. Untuk itu Pemerintah daerah harus dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah dan Investor lokal dan asing. Dalam mengolah ekonomi potensial, daerah perlu menyiapkan kebijakan investasi yang pro bisnis, fasilitasi dan kemudahan dalam mendorong investasi sektor swasta.

- b. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat mengembangkan peran pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan memitragan para pengusaha daerah tersebut dengan para investor.

- c. menciptakan lapangan kerja;

Dengan pengembangan investasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja yang ada yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- d. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;

Provinsi Nusa Tenggara Timur harus mampu mendorong terjadinya investasi yang berwawasan teknologi tinggi, sehingga daerah dapat melakukan alih teknologi (transfer teknologi) dari setiap investasi yang masuk. Perlu juga dirumuskan mengenai bagaimana cara mengembangkan IPTEK baru sebagai hasil reformasi dan demokratisasi yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;

Provinsi Nusa Tenggara Timur harus meningkatkan daya saing daerah melalui perbaikan iklim usaha yang kondusif, keunggulan kompetitif (competitive advantage) dengan meningkatkan nilai tambah pada suatu produk daerah melalui dukungan baik sarana prasarana untuk mengurangi cost produksi dan penciptaan inovasi-inovasi baru dalam mengolah potensi yang ada.

- f. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dapat membuka peluang-peluang usaha dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas kemudahan dan sumber dana yang ada, baik melalui perbankan, lembaga pembiayaan dan sumber-sumber lainnya sehingga pengembangan investasi dan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.

- g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;

Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membangun sebuah daerah yang mandiri dalam kegiatan perekonomian namun tetap dalam pengawasan pemerintah.

- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Investasi di daerah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat, sehingga taraf hidup layak masyarakat dapat terjamin.

- i. meningkatkan pendapatan masyarakat dalam kawasan daerah investasi;

Kehadiran investor akan memberi peluang kepada masyarakat lingkungan sekitar daerah investasi untuk memperoleh pendapatan, karena ikut terlibat dalam aktivitas investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi yang belum memperoleh pekerjaan serta tumbuhnya ekonomi informal dalam lingkungan sekitar.

2.2. Visi dan Misi RUPM Nasional

Visi dan misi yang dituangkan dalam rencana umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai Tahun 2025 adalah: **Penanaman modal yang berkelanjutan, dalam rangka terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, dan sejahtera.**

Dari Visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah :

- a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing,
- b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah,
- c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

2.3. Visi dan Misi RUPM Provinsi NTT

Mengacu pada Visi RPJP Daerah NTT Tahun 2005-2025, maka Visi Penanaman Modal NTT sampai dengan Tahun 2025 adalah ***“Terwujudnya NTT sebagai tujuan investasi yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian daerah”***. Visi tersebut memiliki 3 (tiga) pokok pikiran utama yaitu :

- a. tujuan investasi merupakan fokus utama pengembangan investasi yang ingin dicapai serta diarahkan pada pengembangan potensi lokal;
- b. daya saing dalam arti kemampuan kompetitif daerah dalam meraih kesempatan sebagai suatu upaya meningkatkan nilai ekonomis dan keunggulan potensi daerah melalui penanaman modal; dan

c. kualitas perekonomian daerah; merupakan kondisi perekonomian yang diharapkan tercapai sebagai tujuan akhir pelaksanaan penanaman modal untuk kesejahteraan rakyat dan daerah NTT.

Penanaman modal, meskipun mempunyai peran sentral dalam pembangunan tetapi bukan merupakan aspek yang berdiri sendiri. Kinerjanya akan senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek dan kinerja aktivitas pembangunan lainnya. Namun demikian, justru dengan kedudukannya yang esensial ini, penanaman modal perlu senantiasa mengawal dan menjaga agar tujuan perwujudan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa dapat tercapai.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Namun demikian, kemandirian disini bukan kemandirian dalam keterisolasian. Sebagai bangsa yang berperan aktif dalam pergaulan internasional, kesadaran akan semakin kuatnya ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain dan antar satu daerah dengan daerah yang lain perlu menjadi pola dasar pemikiran.

Dalam konteks ini, kemandirian berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa dan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian tersebut. Kemajuan ekonomi dimaksud, diukur dari tingkat pendapatan maupun distribusi pendapatannya. Tingginya rata-rata pendapatan perlu diimbangi dengan makin membaiknya pemerataan distribusi pendapatan. Keadaan inilah yang menyebabkan ekonomi suatu bangsa dan suatu daerah tidak hanya lebih maju melainkan juga lebih sejahtera.

Namun demikian, dari amanat konstitusi juga perlu diperhatikan bahwa tingkat kemajuan bangsa yang ingin diwujudkan juga perlu ditinjau dari indikator sosial dan politik. Dalam konteks sosial ukurannya adalah terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia ataupun derajat kesehatan masyarakatnya. Sementara itu dari dalam konteks politik ukurannya adalah makin mantapnya sistem hukum dan perangkat kelembagaan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, meskipun tidak terkait langsung kinerja dari kemajuan sosial dan politik memiliki pengaruh kuat bagi kinerja bidang ekonomi, khususnya bila hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk juga meningkatkan kedaulatan Negara dalam kancah pergaulan internasional, menyangkut aspek yang tujuan kesejahteraan bangsa.

Dengan dasar pemikiran inilah, sasaran pembangunan yang akan menjadi perhatian bagi perumusan RUPM ini berkaitan tidak hanya dengan beberapa indikator makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi, peningkatan riil pendapatan perkapita, ataupun distribusi pendapatan saja, melainkan juga pencapaian pada beberapa indikator sosial seperti peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dan beberapa indikator keunggulan iklim investasi seperti pencapaian ranking dari *Ease of Doing Business* dan peningkatan kapasitas penyediaan infrastruktur penunjang investasi.

Untuk mencapai Visi tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Misi Penanaman Modal Provinsi NTT yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanaman Modal
- b. Mengembangkan potensi investasi
- c. Meningkatkan investasi dan realisasi investasi.
- d. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri.

Visi dan Misi Penanaman Modal NTT diimplementasikan secara langsung sesuai dengan sasaran penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal NTT, sebagai berikut :

- a. Kaitannya dengan Misi Daerah memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.
- b. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatnya jumlah dan volume kegiatan investasi.

2.4. Sasaran

1. Sasaran Kualitatif

Secara kualitatif sasaran jangka panjang penanaman modal Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut

- a. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia/tenaga kerja penanaman modal;
- b. meningkatnya kesiapan lahan untuk penanaman modal;
- c. meningkatnya sarana prasarana/infrastruktur yang mendukung penanaman modal;
- d. meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi penanaman modal, yang tertarik dan yang menanamkan modalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. meningkatnya kerjasama pengelolaan aset Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan para investor; dan
- g. meningkatnya realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Sasaran Kuantitatif

Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur masih mencirikan agraris yang ditandai dengan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Nusa Tenggara Timur (berdasarkan harga konstan), namun cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya yaitu masing-masing 35,17% pada Tahun 2012, menjadi 29,80% pada Tahun 2013 dan tahun 2014, serta meningkat pada triwulan II tahun 2015 sebesar 30,82 %.

Sementara sektor industry memberikan kontribusi relatif masih kecil, namun cenderung menurun setiap tahunnya,

antara lain 1,40 % pada Tahun 2012, kemudian turun menjadi 1,24 % pada Tahun 2013, kemudian menurun lagi menjadi 1,23 % pada Tahun 2014 dan kembali mengalami penurunan menjadi 1,20 % pada Triwulan II Tahun 2015.

Dari aspek kebutuhan investasi, diharapkan investasi datang dari masyarakat/swasta sebanyak 70%, yaitu berupa Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri serta investasi dari masyarakat/swasta.

BAB III
GAMBARAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1. Gambaran Umum

a. Letak dan luas

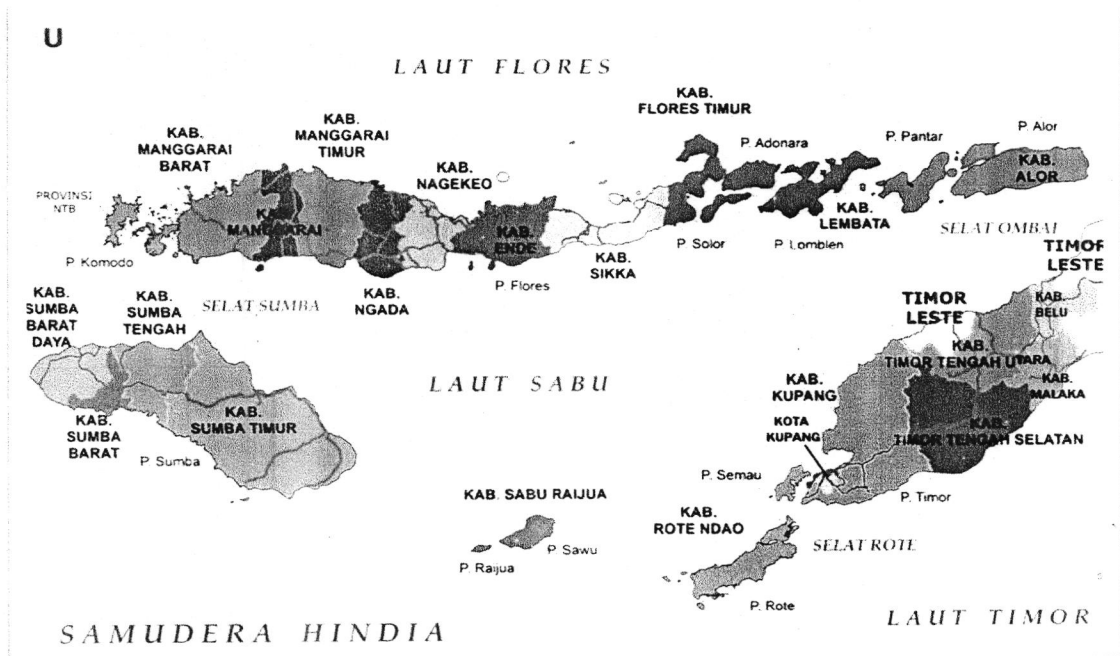
Provinsi NTT terletak pada 8⁰-12⁰ LS & 118⁰-125⁰ BT dengan jumlah pulau (besar dan kecil) 1.192 pulau, pulau bernama 432 pulau, pulau berpenghuni 44 buah dengan iklim 8 bulan kemarau/kering dan 4 bulan hujan/basah. Luas wilayah daratan ± 47.349,9 km² dan lautan ± 200.000 km² serta garis pantai sepanjang ± 5.700 km² dengan wilayah administratif 21 Kab dan 1 Kota, 306 Kecamatan, 3.502 Desa/Kelurahan.

Rincian Kab/Kota dalam wilayah Provinsi NTT terbaca pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

No	Nama Kab/Kota	Ibukota	Luas wilayah	Keterangan
1.	Sumba Barat	Waikabubak	770,23	Pembentukan 1958
2.	Sumba Timur	Waingapu	469,6	Pembentukan 1958
3.	Kupang	Oelamasi	5.299,50	Pembentukan 1958
4.	TTU	Kefamenanu	4.098,81	Pembentukan 1958
5.	TTS	SoE	3.947,69	Pembentukan 1958
6.	Belu	Atambua	1.160,63	Pembentukan 1958
7.	Alor	Kalabahi	1.812,85	Pembentukan 1958
8.	Lembata	Lewoleba	1.731,92	Hasil pemekaran
9.	Flores Timur	Larantuka	1.797,61	Pembentukan 1958
10.	Sikka	Maumere	2.046,82	Pembentukan 1958
11.	Ende	Ende	2.128,97	Pembentukan 1958
12.	Ngada	Bajawa	1.416,96	Pembentukan 1958
13.	Manggarai Barat	Labuanbajo	3.228,27	Hasil pemekaran
14.	Rote Ndao	Ba'a	1.484,11	Hasil pemekaran
15.	Manggarai	Ruteng	2.494,72	Pembentukan 1958
16.	Sumba Tengah	Waibakul	1.877,62	Hasil pemekaran
17.	Sumba Barat Daya	Waitabulak	1.454,62	Hasil pemekaran
18.	Nagekeo	Mbay	1.484,11	Hasil pemekaran
19.	Manggarai Timur	Borong	2.947,50	Hasil pemekaran
20.	Sabu Raijua	Seba	2.864,97	Hasil pemekaran
21.	Malaka	Betun	2.669,66	Hasil pemekaran
22.	Kota Kupang	Kupang	162,73	Hasil pemekaran
Total Luas			47.349,90	

Gambar 3.1
Peta Administratif Provinsi NTT



b. Topografi

Ketinggian wilayah 0-1.000 M dpl seluas 86,35% dan ketinggian >1.000 M dpl seluas 3,65%. Topografi dominan berbukit hingga bergunung-gunung dengan kemiringan >40°. Wilayah dengan kemiringan <8° terbatas dan sebagian besar kemiringan lahan 8°-40° sehingga tingkat erosi tinggi. Topografi Desa/Kelurahan yaitu 5,46 % berada di wilayah puncak, 41,23 % di wilayah lereng, 10,69 % di wilayah lembah dan 42,62% berada pada wilayah datar. Sebagian besar tanah di wilayah ini memiliki solum yang sangat dangkal (<30 Cm). Geologi wilayah termasuk dalam kawasan *circum-pasific* dengan dua karakteristik yaitu; Pulau-pulau seperti Pulau Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau sekitarnya terbentuk secara vulkanik dan sering terjadi patahan dan pulau Sumba, Sabu, Rote, Semau, Timor dan pulau sekitarnya terbentuk dari dasar laut yang terangkat ke permukaan.

NTT memiliki 11 gunung berapi aktif (vulkanik) dengan ketinggian antara 600–2.200 Mdpl, tersebar dari pulau Flores hingga Lembata. Semuanya pernah terjadi erupsi Tahun 1881–2012 dan saat ini sedang aktif Gunung Egon di Kabupaten Sikka. Pulau pada jalur vulkanik tanahnya subur dan kaya potensi tambang namun labil. Deposit tambang yang menonjol yaitu Pasirbesi(Fe), Mangan(Mn), Emas(AU), Flourspor(Fs), Bari(Ba), Belerang(S), posfat(Po), Zeolit(Z), Batu

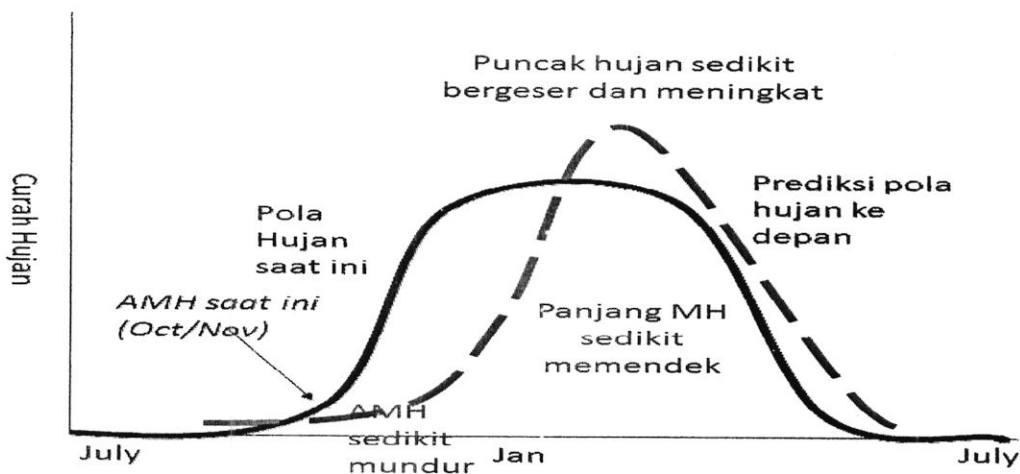
Permata(Gs), Pasir Kwarsa (Ps), Pasir(Ps), Gypsum(Ch), Batu Marmer(Mr), Batu Gamping, Granit(Gr), Andesit (An), Basaltis, Pasir Batu(Pa), Batu Apung (Pu), Tanah Diatomea (Td) Lempung/clay (Td).

c. Iklim

Iklim NTT dipengaruhi geografis wilayah yang letaknya di antara benua Asia dan Australia serta antara samudera Hindia dan Pasifik. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 8 jam per hari. Musim hujan berlangsung antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar 850 mm terjadi di Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara curah hujan tahunan kisaran 2500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus, Mano, Pagal dan Lelogama. Fenomena iklim global (El Nino dan La Nina) juga mempengaruhi kondisi iklim secara umum wilayah. Pada saat terjadinya fenomena El Nino (2009/2010, 2013, 2015), awal musim hujan umumnya mundur 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin pendek dan sifat hujan umumnya di bawah normal sehingga berdampak pada kekeringan. Sebaliknya saat La Nina (2010, 2012), awal musim hujan umumnya maju 1-3 dasarian, periode musim hujan semakin panjang dan sifat hujan diatas normal dan berpotensi menyebabkan banjir.

Berdasarkan analisis data series iklim (suhu udara dan curah hujan) selama 30 tahun (1983-2012), suhu udara rata-rata bulanan mengalami kecenderungan peningkatan 0.2°C – 0.4°C dan curah hujan bulanan mengalami peningkatan sebesar 25-100 mm. Sementara itu awal terjadinya musim hujan cenderung mundur 1 s/d 3 dasarian dari normalnya. Periode musim hujan semakin pendek sebaliknya periode musim kemarau semakin panjang. Perkiraan Awal Musim Hujan (AMH) dan Musim Hujan (MH) hasil kajian iklim NTT dan pemodelan iklim, SPARC project UNDP sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.2
Perkiraan Perubahan Pola Hujan Dan Curah Hujan
di NTT Tahun 2020



Kondisi iklim demikian mendeterminasi pola pertanian tradisional yang hanya mengusahakan tanaman semusim yang ditanam dalam periode musim hujan. Persoalan curah hujan dan pengaruh iklim global, terutama fenomena El Nino dan La Nina serta fenomena perubahan iklim global yang kurang menguntungkan berakibat pada kekeringan, gagal tanam, gagal panen, banjir dan gangguan hama dan penyakit tanaman yang serius.

Untuk keseimbangan lingkungan terdapat kawasan lindung seluas 652.916 Ha yang terbagi dalam beberapa jenis kawasan yaitu kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 170.461 Ha, kawasan taman buru seluas 4.498 Ha, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa dan kawasan koridor jenis satwa/biota laut yang dilindungi. Kawasan perlindungan terdiri atas kawasan sempadan pantai seluas 56.274 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 181.837 Ha dan kawasan sekitar danau seluas 28.944 Ha. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas: kawasan suaka alam laut; Laut Sawu dan Laut Flores; kawasan suaka margasatwa seluas 12.322 Ha, kawasan cagar alam seluas 47.253 Ha, kawasan pantai berhutan bakau seluas 10.073 Ha, kawasan taman nasional seluas 151.483 Ha; kawasan taman nasional laut Komodo dan kawasan taman nasional laut selat Pantar, kawasan taman hutan raya Prof Ir. Herman Yohannes, kawasan taman wisata alam seluas 55.537 Ha, kawasan taman wisata alam laut dan kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan.

Nusa Tenggara Timur perlu mewaspadaai fenomena bencana alam karena memiliki beberapa daerah rawan bencana longsor, banjir, geologi dan pergeseran tanah. Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Malaka, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende.

Kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: kawasan rawan gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Alor; Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote.

Kawasan rawan gunung berapi meliputi: Kawasan Gunung Inelika, Illi Lewotolo, Illi Boleng, Lereboleng, Lewotobi Laki-laki dan Lewotobi Perempuan (Kabupaten Flores Timur); Kawasan Gunung Anak Ranakah (Manggarai); Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu (Ende); Kawasan Gunung Inerie (Ngada); Kawasan Gunung Ebulobo (Nagekeo); Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon (Sikka); Kawasan Gunung Sirung (Alor); dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape (Lembata). Kawasan rawan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten

Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Timur.

Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan permukiman. Kawasan peruntukan hutan seluas 258.845 Ha, 206.747 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan 103.889 Ha Kawasan peruntukan hutan produksi.

d. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 4.776.485 jiwa pada Tahun 2011; 4,899,260 jiwa pada Tahun 2012, 4.953.967 jiwa pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 menjadi 5.036.897 jiwa; namun dari angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan, yaitu 1,72% pada Tahun 2011, 1,70 pada Tahun 2012, dan pada Tahun 2013 sebesar 1,67% Persebaran penduduk NTT sebagian besar berada di pulau Flores (38,58%) disusul pulau Timor (35,68%), pulau Sumba (14,75%) dan pulau lainnya (10,98%). Kabupaten dengan penduduk terbanyak adalah TTS dengan jumlah penduduk 456.152 jiwa diikuti Kota Kupang dengan jumlah penduduk 380.084 jiwa. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Sumba Tengah (67.393 jiwa) dan Sabu Raijua (83.501 jiwa).

Kepadatan penduduk NTT sebesar 105 jiwa/km², dengan sebaran kepadatan wilayah Flores dan Timor 123 jiwa/km², Sumba 67 jiwa/km² dan pulau lainnya 94 jiwa/km². Daerah terpadat penduduknya adalah Kota Kupang (2.336 jiwa/km²) diikuti Kab. Manggarai (228 jiwa/km²) dan Sumba Barat Daya (215 jiwa/km²). Sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kab. Sumba Timur (34 jiwa/km²), Sumba Tengah (36 jiwa/km²) dan Kab. Kupang (64 jiwa/km²).

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) laki-laki per 100 perempuan menunjukkan tingkat Provinsi 98, WP Sumba mencapai 106, WP Timor-Alor-Rote Sabu 100 dan WP Flores Lembata mencapai 94. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) NTT dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2**Rasio Ketergantungan Penduduk NTT 2010 - 2014**

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Ketergantungan usia muda	8,36	8,3	8,24	8,19	8,16
Angka Ketergantungan usia lanjut	62,25	61,69	60,96	60,15	59,34
Angka Ketergantungan/ Dependency Ratio	70,6	69,99	69,2	68,34	67,5

Sumber : BPS Dalam angka dan analisis Bappeda

3.2. Kondisi Makro Ekonomi dan Investasi**a. Kondisi Umum**

Pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II tahun 2015 tumbuh sebesar 5,03% (yoy), relative stabil bila dibandingkan kinerja triwulan tahun 2014 yang tercatat sebesar 4,64% (yoy). Adanya perbaikan daya beli dan mulai berjalannya investasi menjadi penyebab utama peningkatan pertumbuhan ekonomi. Total PDRB pada triwulan II 2015 mencapai Rp 18,48 triliun.

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi di NTT mampu tumbuh paling tinggi dibanding Provinsi NTB dan Bali. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan II 2015 sebesar 4,2% (qtq), lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB yang sebesar 3,8% (qtq) dan Provinsi Bali yang sebesar 2,9% (qtq). Kondisi ekonomi mulai mengalami kenaikan seiring dengan mulai terealisasinya pembangunan konstruksi dan real estate, peningkatan kinerja perdagangan serta meningkatnya okupansi hotel setelah mengalami penurunan yang cukup besar di triwulan I 2015.

b. Sisi penggunaan

Kondisi ekonomi pada triwulan II 2015 mulai menunjukkan adanya peningkatan. Hampir semua pengeluaran mengalami kenaikan kecuali kinerja ekspor luar negeri yang sedikit melambat. Peningkatan kinerja terbesar terjadi pada pengeluaran konsumsi pemerintah yang mampu tumbuh hingga 89,92% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Penyerapan anggaran pada semester II 2015 diperkirakan akan meningkat lebih tinggi seiring dengan masih

rendahnya realisasi penyerapan belanja konsumsi pemerintah yang hanya sebesar 29,69% atau sebesar Rp 6,51 triliun.

Secara tahunan, kinerja investasi menunjukkan pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tingginya kenaikan belanja modal pemerintah hingga 27,07% (yoy) mampu mendorong peningkatan investasi di NTT. Tingginya investasi pemerintah pusat seharusnya juga dapat direspon oleh peningkatan investasi pemerintah kabupaten yang hanya tumbuh 3,21% (yoy) dibanding pagu anggaran tahun sebelumnya. Walaupun penyerapan anggaran investasi pemerintah secara total baru terealisasi 10,15%, penandatanganan proyek sebagian besar sudah dilakukan dan sudah mulai dilakukan pembangunan fisik bangunan. Namun demikian, tingginya investasi tersebut tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh pelaku ekonomi lokal yang terlihat dari meningkatnya impor antar daerah seiring dengan peningkatan investasi yang terjadi.

1) Konsumsi

Pengeluaran konsumsi pada triwulan II mulai menunjukkan kenaikan yang cukup besar. Kenaikan daya beli lebih disebabkan oleh mulai optimisnya masyarakat seiring dengan datangnya masa panen komoditas pertanian, berjalannya proyek-proyek pemerintah, musim liburan sekolah dan bulan Ramadhan. Konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan hingga 7,53% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Datangnya panen mampu meningkatkan daya beli masyarakat yang terlihat dari indeks riil penjualan eceran yang mengalami peningkatan. Berdasarkan rincian komoditas, hampir semua komoditas menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan penjualan.

Konsumsi lembaga non profit juga menunjukkan adanya peningkatan walaupun dibanding tahun sebelumnya masih mengalami penurunan. Konsumsi pemerintah menunjukkan adanya peningkatan di triwulan-II 2015. Namun demikian, dengan pertumbuhan realisasi belanja tahunan hanya sebesar 5,65% (yoy), peluang pertumbuhan konsumsi pemerintah pada semester II akan jauh lebih besar.

2) Investasi

Kinerja investasi di Provinsi NTT pada triwulan II 2015 mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan investasi terutama berasal dari realisasi investasi pemerintah yang sudah mulai berjalan, walaupun berdasarkan penyerapan anggaran investasi pemerintah baru terealisasi 10,15%. Selain itu, pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi juga memiliki anggaran modal yang mencapai Rp 4,2 triliun, sehingga total belanja modal pemerintah tahun 2015 mencapai Rp 9,18. Rendahnya realisasi belanja modal selain dikarenakan oleh permasalahan nomenklatur juga disebabkan oleh permasalahan spesifik di beberapa dinas terkait.

3) Net ekspor

Net ekspor antar daerah tumbuh sebesar 34,7% (yoy) dibanding tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 34,03% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya mengikuti peningkatan ekonomi dan investasi yang terjadi. Tingginya net impor juga terlihat dari aktivitas peti kemas bongkar maupun bongkar muat yang menunjukkan defisit masuk NTT yang cukup besar. Hal ini menunjukkan besarnya kebutuhan NTT yang masih harus dipenuhi dari luar daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi terlihat dari meningkatnya kegiatan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tenau.

Aktivitas ekspor bersih ke luar negeri Provinsi NTT pada triwulan II sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang tidak sebesar peningkatan impor yang terjadi. Timor leste masih menjadi tujuan ekspor utama Provinsi NTT yang lebih disebabkan oleh adanya kedekatan wilayah. Sedangkan komoditas impor utama provinsi NTT adalah peralatan kelistrikan yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik yang sedang gencar dilakukan oleh PLN. Negara asal impor sebagian besar dari Tiongkok.

c. Sisi Sektoral

Dari sisi sektoral, hampir semua sektor utama NTT mengalami perlambatan. Tiga sektor utama yang menjadi penggerak roda perekonomian Provinsi NTT memiliki kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan

laporan adalah sektor pertanian, sektor Administrasi Pemerintahan sektor perdagangan besar dan eceran dengan andil masing-masing sektor pada periode laporan sebesar 30,8%, 11,7% dan 10.8% .

1) Sektor Pertanian

Pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya. Peningkatan produksi pertanian lebih disebabkan oleh datangnya panen raya tanaman pangan dan beberapa komoditas perkebunan serta membaiknya cuaca yang mampu meningkatkan tangkapan ikan. Sektor pertanian pada triwulan II 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,00% (yoy) dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh bertambahnya luas panen komoditas tanaman pangan. Walaupun demikian, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara triwulan tidak sebesar triwulan yang sama tahun sebelumnya. Adanya hama tanaman serta curah hujan yang tinggi di beberapa daerah menyebabkan penurunan produktifitas padi. Di sisi lain, beberapa daerah berhasil meningkatkan panen seperti di Rote Ndao, dan beberapa daerah di Manggarai Timur optimis bisa panen 3 kali dalam setahun.

Tanaman jagung juga mengalami peningkatan produksi. Namun demikian, dikarenakan kurangnya pasar, harga jagung di Nagekeo jatuh menjadi hanya Rp 2.000/kg lebih rendah dari penetapan harga jagung yang sebesar Rp. 2.700/Kg. Kondisi perikanan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya cuaca. Adanya pemberantasan illegal fishing juga berdampak positif terhadap peningkatan hasil ikan tangkap.. Pengiriman ternak juga menunjukkan adanya kenaikan cukup tinggi setelah di triwulan sebelumnya relatif sangat minim karena masalah cuaca. Untuk meningkatkan produksi pertanian, Dinas Pertanian telah mendapatkan tambahan alokasi APBN sebesar Rp 319 miliar untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi (saprodi) pertanian.

2) Sektor Jasa-jasa

Kinerja sektor jasa-jasa mengalami sedikit perlambatan pada periode laporan. Pertumbuhan sektor jasa-jasa tercatat sebesar 7,15% (yoy) atau sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 7,24% (yoy). Dominasi subsektor jasa pemerintahan umum dengan kontribusi sebesar 76,08% masih menjadi penopang utama sektor jasa-jasa meskipun mengalami perlambatan yang tercatat sebesar 7,66% pada periode laporan. Sementara subsektor jasa swasta mengalami peningkatan yakni dari 5,05% (yoy) menjadi sebesar 5,55% (yoy). Peningkatan tertinggi subsektor jasa swasta berasal dari jasa perorangan dan rumah tangga. Secara triwulanan, sektor jasa-jasa mengalami peningkatan cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 5,59% (qtq) dibandingkan triwulan lalu yang tercatat sebesar -8,10% (qtq). Seperti halnya pertumbuhan tahunan, subsektor jasa pemerintahan umum menjadi penyumbang terbesar dalam laju pertumbuhan sektor jasa-jasa secara umum.

Secara tahunan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan 7,71% (yoy) meningkat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya. Mulai selesainya permasalahan numenklatur membuat penyerapan dana pemerintah mengalami peningkatan walaupun realisasi penyerapan anggaran masih relatif rendah. Realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah di triwulan II masih sebesar 23,92%. Dibanding tahun sebelumnya, belanja pemerintah mengalami kenaikan 13,74% (yoy). Dengan kumulatif pertumbuhan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sebesar 6,84% (ctc), Pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut berpotensi tumbuh lebih tinggi pada semester-II 2015. Adapun penyerapan anggaran yang relatif besar dilakukan oleh kepolisian yang sudah terealisasi sebesar 45,14%.

Peningkatan belanja pemerintah juga tampak dari adanya penurunan pertumbuhan simpanan masyarakat di perbankan. Walaupun pertumbuhan penghimpunan dana masih cukup tinggi, tren penambahan dana relatif melambat dibanding triwulan sebelumnya. Hingga bulan Juni 2015, total dana pemerintah yang disimpan di perbankan di NTT mencapai Rp 7,21 triliun. Adanya percepatan realisasi belanja pemerintah dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi NTT yang saat ini masih dibayangi perlambatan ekonomi nasional

3) Sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR)

Peningkatan kinerja sub sektor perdagangan juga tercermin dari perkembangan omset penjualan eceran (Survei Pedagang Eceran Bank Indonesia Provinsi NTT) dan aktivitas bongkar muat melalui pelabuhan tenau yang mengalami peningkatan pada periode laporan. Musim liburan sekolah menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan sub sektor hotel dan restoran dengan peningkatan masing-masing yakni dari -7,32% (qtq) dan -4,26% (qtq) menjadi sebesar 3,89% (qtq) dan 4,17% (qtq). Hal ini terkonfirmasi dari peningkatan jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang pada triwulan laporan sebesar 24,28% (qtq) atau meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -28,54% (qtq).

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan cukup besar seiring dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat paska panen, liburan sekolah, menjelang puasa dan mulai terealisasinya belanja barang dan jasa pemerintah. Pertumbuhan sektor perdagangan pada triwulan II 2015 mencapai 6,48% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya (5,33%-yoy) maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya (3,57%-yoy). Pertumbuhan ekonomi secara triwulanan juga mengalami kenaikan cukup tinggi (5,27%-qtq) selain disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi di triwulan sebelumnya, juga disebabkan oleh peningkatan daya beli.

Hasil survei Sensus Keuangan dan Usaha di triwulan II 2015 masih menunjukkan adanya penurunan namun membaik dibanding triwulan sebelumnya. Perlambatan permintaan di tingkat pemain besar ini selain disebabkan oleh perlambatan daya beli juga adanya permasalahan terkait pengetatan penindakan pajak yang berlaku surut. Adanya libur sekolah dan bulan ramadhan cukup membantu penjualan yang berdasarkan hasil liaison menunjukkan kenaikan permintaan di bulan Juni 2015.

4) Sektor lainnya

Sektor konstruksi mampu tumbuh tinggi baik secara triwulanan maupun tahunan seiring dengan mulai terealisasinya proyek investasi. Begitu pula dengan pertumbuhan real estate yang tumbuh cukup besar seiring dengan mulai terealisasinya pembangunan program 1.000 rumah dalam rangka mendukung program sejuta rumah pemerintah. Penyediaan akomodasi dan makan minum di triwulan II 2015 mengalami pertumbuhan hingga 8,67% (qtq) dibanding triwulan sebelumnya. Adanya pelonggaran kebijakan larangan rapat di hotel oleh pemerintah, penyelenggaraan beberapa even pariwisata seperti Semana Santa di Larantuka, serta membaiknya cuaca membuat kunjungan pariwisata di triwulan II 2015 mengalami peningkatan. Besarnya kenaikan kunjungan juga disebabkan oleh penurunan yang cukup dalam di triwulan sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 6,23% (yoy) masih lebih rendah dibanding pertumbuhan di triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 7,19% (yoy) seiring dengan masih adanya dampak Sail Komodo yang mampu meningkatkan kunjungan wisata dalam jumlah yang signifikan. Adanya event pariwisata sekiranya dapat terus diadakan agar mampu membantu peningkatan kunjungan pariwisata.

Peningkatan kunjungan juga terlihat dari tingginya peningkatan okupansi dan tamu hotel yang menginap di wilayah Provinsi NTT. Jumlah penumpang yang terbang dari dan menuju NTT juga menunjukkan penambahan yang cukup

signifikan. Peningkatan kunjungan wisata disebabkan oleh membaiknya cuaca. Kondisi cuaca sangat mempengaruhi wisata unggulan NTT yang lebih bersifat *eco tourism*. Sektor komunikasi dan informasi masih bertumbuh positif, namun relatif melambat dibanding triwulan-triwulan sebelumnya. Sektor pertambangan mengalami kenaikan tinggi di triwulan II 2015 seiring dengan membaiknya cuaca. Jasa pendidikan tumbuh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan NTT. Namun demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pendidikan seharusnya dapat meningkat jauh lebih tinggi seiring dengan adanya pemisahan numenklatur pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang berdampak pada peningkatan anggaran pendidikan di Provinsi NTT hingga 119,47% (yoy). Setelah permasalahan numenklatur selesai, penyerapan anggaran pendidikan diperkirakan akan mampu jauh lebih tinggi dibanding saat ini.

d. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan PDRB sisi sektoral, pertumbuhan tahunan PDRB sisi sektoral, perkembangan PDRB sisi penggunaan dan pertumbuhan tahunan PDRB sisi penggunaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan PDRB Sisi Sektoral

INDIKATOR	2013	2014	2014		2015 - Q1		2015 - Q2	
			I	II	I	II	%Q1/Q	%YOY
Berdasarkan Sektor/ Lapangan								
Usaha (Harga Berlaku)								
Produk Domestik Regional Bruto								
(Harga Berlaku)	61.325,50	68.602,60	15.818,00	18.059,00	17.469,20	18.483,60	4,20%	5,00%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.272,40	20.446,90	4.855,10	5.042,50	5.367,80	5.695,80	4,70%	3,00%
Pertambangan dan Penggalian	894,2	1.070,30	220	305,6	273,8	324,3	16,70%	5,90%
Industri Pengolahan	758,8	843,7	193,3	231,6	215,7	222,4	1,80%	4,50%
Pengadaan Listrik dan Gas	23,6	31,5	6,9	9,5	8,9	9,4	4,90%	6,80%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41,8	45,5	10,6	11,9	11	11,5	4,20%	4,00%
Konstruksi	6.344,80	7.096,00	1.625,30	1.907,50	1.700,50	1.899,00	9,80%	5,50%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.570,50	7.285,70	1.691,30	1.893,60	1.872,50	1.998,30	5,30%	6,50%
Transportasi dan Pergudangan	3.195,30	3.566,90	808,8	974,6	904,2	955,5	3,50%	5,70%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367,8	422,4	95	116,8	105,7	116,2	8,70%	6,20%
Informasi dan Komunikasi	4.660,20	5.134,40	1.216,20	1.337,50	1.276,40	1.322,70	3,40%	6,30%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.389,30	2.714,90	638,3	731,9	725,1	706,4	-4,00%	1,10%
Real Estate	1.705,50	1.860,90	433,3	496,4	464,3	496	5,60%	4,00%
Jasa Perusahaan	188,5	210,9	49,2	55,8	54,4	57,7	3,70%	5,10%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial								
Wajib	7.592,10	8.392,70	1.872,00	2.278,50	2.091,00	2.161,90	1,90%	7,70%
Jasa Pendidikan	5.679,60	6.568,20	1.434,20	1.880,40	1.650,50	1.707,00	0,80%	5,90%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.279,70	1.414,60	309,9	394,6	359,9	393,3	7,20%	5,90%
Jasa lainnya	1.361,30	1.497,00	358,6	390,4	387,5	406,1	3,30%	4,80%

Sumber : BPS diolah Dalam Rp miliar

Tabel 3.4
Pertumbuhan Tahunan PDRB Sisi Sektoral

Sektor	2012				2013				2014	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Pertanian	2.78%	2.99%	3.70%	3.10%	2.67%	2.70%	2.42%	2.82%	3.19%	2.93%
Pertambangan	6.54%	5.78%	7.35%	6.70%	5.97%	6.41%	3.69%	4.10%	4.97%	4.92%
Industri Pengolahan	4.96%	3.90%	5.57%	5.44%	1.53%	3.02%	3.26%	3.48%	4.65%	3.94%
Listrik, Gas dan Air	6.25%	4.91%	5.49%	4.82%	9.07%	7.10%	6.96%	7.02%	6.13%	8.77%
Bangunan (Konstruksi)	8.52%	5.08%	8.38%	8.25%	6.45%	6.09%	4.05%	4.39%	5.65%	3.97%
Perdagangan, Hotel & Restoran	7.22%	6.34%	7.50%	7.60%	6.80%	7.68%	8.78%	8.82%	5.40%	5.84%
Transportasi & Komunikasi	6.82%	5.19%	5.58%	4.86%	6.08%	4.13%	5.59%	6.20%	3.39%	5.14%
Keuangan dan Persewaan	7.32%	8.15%	7.85%	7.36%	8.05%	7.69%	9.95%	9.89%	7.42%	7.41%
Jasa-jasa	6.75%	5.93%	6.77%	6.34%	7.55%	8.22%	7.65%	6.65%	7.24%	7.15%
PDRB	5.44%	4.87%	5.86%	5.47%	5.38%	5.58%	5.64%	5.62%	5.02%	5.03%

Sumber : BPS Diolah

Tabel 3.5
Perkembangan PDRB Sisi penggunaan

INDIKATOR	2013	2014	2014		2015 - Q1		2015 - Q2	
			I	II	I	II	%Q1/Q2	%YOY
Perkembangan Permintaan / Penggunaan (Harga Berlaku)								
Domestik Regional Bruto (Harga Berlaku)	61.325,50	68.602,60	15.818,00	18.059,00	17.469,20	18.483,60	4,24%	5,03%
Permintaan Rumah Tangga	47.277,10	51.082,80	12.403,10	13.460,90	13.140,50	13.758,80	3,30%	6,50%
Permintaan Lembaga Non Profit	1.868,30	2.323,80	572,1	580,7	536,5	603,8	10,90%	-7,70%
Permintaan Pemerintah	16.400,30	21.055,60	2.532,00	5.676,70	2.544,00	4.922,30	89,90%	5,60%
Pendapatan Modal Tetap Bruto	20.620,30	26.393,00	6.076,80	8.070,40	7.156,10	7.841,70	4,80%	28,30%
Perubahan Inventori	1.094,30	994,3	167,8	277,4	48,3	149,7	206,20%	50,60%
Ekspor Luar Negeri	1.196,30	1.382,30	309,1	391,7	363	379,2	-0,60%	27,70%
Impor Luar Negeri	923,5	1.103,20	121,7	452,1	51,4	141,5	173,80%	58,40%
Saldo Perdagangan Antar Daerah (Import)	26.207,70	33.526,00	-6.121,20	-9.946,70	-6.267,90	-9.030,40	34,00%	26,00%

Sumber : BPS diolah Dalam Rp miliar

Tabel 3.6
Pertumbuhan Tahunan PDRB Sisi Penggunaan

Penggunaan	2012				2013				2014	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Konsumsi	3.09%	5.78%	5.59%	7.25%	4.60%	5.35%	4.00%	2.17%	7.11%	3.69%
Investasi	15.75%	12.30%	7.09%	8.61%	6.63%	7.50%	10.99%	6.37%	7.46%	4.41%
Ekspor	6.80%	9.31%	0.62%	3.64%	8.08%	7.83%	9.26%	3.32%	2.03%	6.23%
Impor	-4.80%	2.11%	0.04%	5.60%	5.43%	6.24%	4.63%	2.74%	11.19%	0.60%
Perubahan stok	-69.22%	-40.21%	-13.21%	-14.57%	1.68%	0.43%	-2.44%	39.78%	75.22%	-18.01%
PDRB	5.44%	4.87%	5.86%	5.47%	5.38%	5.58%	5.64%	5.62%	5.02%	5.03%

Sumber : BPS diolah

e. Inflasi

Berdasarkan data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi NTT TW II-2015, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan inflasi pada triwulan II 2015 dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga BBM. Komoditas tarif angkutan udara menjadi komoditas pendorong utama inflasi pada bulan Mei dan Juni, serta pendorong utama ke-2 setelah bensin pada bulan April. Dibandingkan capaian inflasi nasional, inflasi Provinsi NTT relatif lebih rendah, baik secara triwulanan maupun tahunan.

Inflasi tahunan Provinsi NTT pada triwulan II 2015 tercatat sebesar 6,01% (yoy) lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 7,26% (yoy). Secara triwulanan, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,25% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Angka tersebut masih lebih rendah Apabila dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB), pencapaian inflasi provinsi NTT secara tahunan (6,01%-yoy) tercatat paling rendah. Secara tahunan, inflasi Provinsi NTT mengalami kenaikan dari 5,39% (yoy) pada triwulan I 2015 menjadi 6,01% (yoy) pada triwulan II 2015. Secara triwulanan, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 1,25% (qtq), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi -0,47% (qtq).

Inflasi pada triwulan II terutama disumbang oleh komoditas transportasi serta daging dan hasil-hasilnya. Sementara penahan laju inflasi terutama berasal dari komoditas ikan segar seiring cuaca yang mendukung pada triwulan II. Berdasarkan pergerakan inflasi bulanan, Inflasi cukup tinggi terjadi pada bulan Juni 2015, dengan nilai inflasi sebesar 0,59% (mtm). Inflasi pada bulan Juni terutama didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara dan komoditas ayam (daging ayam ras, telur ayam ras, ayam hidup dan ayam goreng).

Pada bulan April, Provinsi NTT mengalami inflasi sebesar 0,21% (mtm) yang terutama disebabkan oleh komoditas transportasi seiring dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada akhir Maret 2015. Selain pengaruh kenaikan harga BBM, inflasi pada bulan April juga didorong oleh kenaikan tarif angkutan udara. Adanya libur panjang (*long weekend*), seperti perayaan Paskah diperkirakan menjadi salah satu pendorong meningkatnya permintaan tiket pesawat. Sementara adanya kebijakan pembatasan pasokan bibit ayam / *Day Old Chick* (DOC) mulai mendorong kenaikan harga ayam hidup, terutama di Kota Maumere. Pada Bulan Mei, Provinsi NTT kembali mengalami inflasi sebesar 0,45% (mtm). Komoditas Angkutan Udara menjadi pendorong utama terciptanya inflasi. Berdasarkan komoditas penyumbang inflasi secara tahunan, komoditas transportasi, komunikasi dan jasa, pendidikan,

rekreasi dan olah raga serta komoditas makanan jadi, minuman dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sedangkan komoditas bahan makanan, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar mampu menjadi komoditas penahan inflasi secara tahunan. Inflasi bahan makanan menunjukkan nilai terendah dibanding komoditas lainnya dengan pertumbuhan inflasi tahunan hanya sebesar 3,73% (yoy). Secara triwulanan, inflasi terendah dicapai oleh Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar (0,07%-qtq). Di sisi lain, komoditas transportasi, komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami inflasi tertinggi hingga 8,92% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, begitu pula secara triwulan yang mencapai 3,48% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Apabila dilihat berdasarkan disagregasi inflasi, peningkatan inflasi tahunan pada bulan Juni disebabkan oleh kenaikan inflasi *administered prices* dan trend kenaikan inflasi *volatile food*. Sementara, inflasi inti (*core*) tercatat masih cukup stabil. Berdasarkan sumbangan inflasi, sumbangan inflasi komoditas inti masih menjadi penyumbang inflasi terbesar disusul oleh komoditas *administered prices*, dan komoditas *volatile food*.

Pola Inflasi Kota Kupang pada triwulan II 2015 searah dengan inflasi Provinsi NTT. Secara tahunan, inflasi Kota Kupang sebesar 6,57%, lebih besar dibanding inflasi tahunan Provinsi NTT yang sebesar 6,01% (yoy). Secara triwulanan, inflasi Kota Kupang sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi NTT yaitu sebesar 1,36% (qtq) dibandingkan Provinsi NTT yang sebesar 1,25% (qtq). Secara bulanan, inflasi kota Kupang mengalami penurunan di bulan April sebesar 0,18% (mtm), kemudian mengalami trend kenaikan pada bulan Februari sebesar 0,50% (mtm) dan 0,67% (mtm) di bulan Juni 2015.

Inflasi Kota Maumere kembali menunjukkan penurunan pada triwulan II 2015 yang hanya sebesar 2,24% (yoy) dibanding tahun sebelumnya, jauh lebih rendah dibanding inflasi Provinsi NTT yang sebesar 6,01% (yoy). Secara tahunan, pencapaian inflasi pada triwulan-II 2015 di Kota Maumere didorong oleh komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau yang mencatat inflasi sebesar 10,65% (yoy)

dibandingkan tahun sebelumnya. Namun apabila dilihat secara triwulanan, inflasi tertinggi disebabkan oleh sub kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga yang mencatat inflasi sebesar 4,82% (qtq). Sementara itu, inflasi sub kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan tercatat sebesar 8,48% (yoy) dan 1,83% (qtq) lebih rendah dibanding Kota Kupang yang sebesar 8,98% (yoy) dan 3,58% (qtq).

f. Prospek perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada Triwulan-III 2015 diperkirakan mengalami pertumbuhan positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Terjadinya peningkatan didasarkan oleh berbagai indikator ekonomi, serta hasil survei dan liasion yang menunjukkan optimisme masyarakat pada triwulan-III dan diperkirakan akan berada pada rentang 5,2% - 5,6% (yoy) dibandingkan triwulan II-2015 yang hanya sebesar 5,03% (yoy). Namun pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT secara keseluruhan pada tahun 2015 diperkirakan mengalami perlambatan seiring menurunnya daya beli masyarakat dan diperkirakan berada pada rentang baru yaitu 5% - 5,4% (yoy). Faktor penahan pertumbuhan lainnya, diantaranya adalah El Nino yang diperkirakan menurunkan produksi pertanian walaupun tidak terlalu besar dikarenakan waktu puncak El Nino yang terjadi di luar masa tanam.

Di sisi sektoral, secara tahunan pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan akan mengalami perlambatan. Peningkatan produksi peternakan seiring kebutuhan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha serta produksi perikanan yang meningkat sebagai dampak positif El Nino diperkirakan dapat menjadi pendorong sub sektor perikanan untuk tetap tumbuh. Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib diperkirakan akan mengalami kenaikan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diperkirakan mengalami peningkatan meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Sektor konstruksi diperkirakan meningkat seiring peningkatan kegiatan proyek pemerintah dan swasta. Sektor Jasa Pendidikan diperkirakan meningkat seiring peningkatan anggaran pada Pendidikan Tinggi.

Dari sisi penggunaan, komponen konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat seiring optimisme masyarakat yang tercermin pada angka Indeks Tendensi Konsumen (ITK) dan hasil Survei Konsumen (SK). Perkembangan kinerja komponen investasi diperkirakan mengalami peningkatan. Peningkatan dapat terlihat dari jumlah *RTGS* yang masuk ke Provinsi NTT pada bulan Juni 2015 sebesar Rp 14,6 triliun atau tumbuh sebesar 166% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari segi inflasi secara tahunan, pertumbuhan inflasi pada triwulan-III 2015 diperkirakan mengalami peningkatan. Berdasarkan perkembangan harga terkini, inflasi NTT di triwulan-III 2015 diperkirakan berada pada kisaran 6,8% - 7,2% (yoy). Adapun tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh komoditas angkutan udara dan beras seiring persepsi negatif akan dampak El Nino dan tingginya kenaikan harga beras di tingkat produsen karena tingginya penyerapan beras bulog. Potensi impor secara terbatas oleh Bulog diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk menekan kenaikan harga di tingkat produsen. Secara triwulanan, inflasi diperkirakan mengalami perlambatan, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami deflasi. Hingga akhir tahun 2015 diperkirakan inflasi masih berada pada rentang $4,16\% \pm 1\%$ (yoy) seiring hilangnya pengaruh base effect di akhir tahun. Apabila dilihat dari perkembangan inflasi bulanan, inflasi pada triwulan-III 2015 diperkirakan akan mencapai puncaknya pada bulan Juli 2015 seiring momen libur idul fitri dan liburan sekolah, namun cenderung turun pada bulan Agustus dan September.

3.3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Jumlah penduduk dan tenaga kerja yang besar merupakan faktor daya tarik penanaman modal di Provinsi NTT. Provinsi NTT memiliki jumlah penduduk sekitar 5.036,897 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,67% yang merupakan terbesar pertama di pulau Nusa Tenggara dan Bali dan ke sebelas secara nasional. Jumlah penduduk yang besar memiliki pasar yang sangat menjanjikan, terlebih apabila didukung oleh

daya beli masyarakat yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan terus meningkat, memberikan indikasi bahwa daya beli masyarakat akan terus menguat. Di sisi lain jumlah penduduk yang besar juga merupakan potensi tenaga kerja dalam kegiatan penanaman modal.

Data BPS Provinsi NTT menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk usia kerja di Provinsi NTT sebanyak 3.261.399 orang (64,75% penduduk), jumlah angkatan kerja sebanyak 2.247.438 orang (68,91% usia kerja), serta penduduk yang bekerja sebanyak 2.174.228 orang (96,74% angkatan kerja). Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 43,17% dari total penduduk NTT yang bekerja sedangkan 56,83% lainnya tidak bekerja.

Dari segi pendidikan penduduk usia kerja dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Angkatan Kerja di Provinsi NTT Menurut tingkat Pendidikan

Pendidikan	Angkatan Kerja							
	Bekerja	%	Pengangguran	%	Jumlah	%	Angkatan Kerja	%
SD ke bawah	1.356.171	62,37	17.924	24,48	1.374.095	61,14	506.247	49,93
SLTP	272.676	12,54	8.205	11,21	280.881	12,50	301.311	29,72
SLTA	364.047	16,74	30.262	41,34	394.309	17,54	187.187	18,46
Diploma	56.531	2,60	3.644	4,98	60.175	2,68	7.701	0,76
S1	115.443	5,31	12.853	17,56	128.296	5,71	11.181	1,10
S2 /S3	9.360	0,43	322	0,44	9.682	0,43	274	0,03
Total	2.174.228	100,00	73.210	100	2.247.438	100	1.013.901	100

Data tersebut menunjukan bahwa provinsi NTT masih memiliki kelemahan dalam hal masih rendahnya kualitas, terlihat dari penduduk yang bekerja sebagian besar berpendidikan SD ke bawah sebanyak 1.356.171 orang (62,37%), sedangkan tenaga kerja yang siap untuk memasuki dunia usaha adalah lulusan SLTA yaitu sebanyak 30.232 orang (41,34%).

Upaya mengatasi persoalan rendahnya kualitas tenaga kerja adalah dengan melaksanakan pentahapan pembenahan terhadap infrastruktur sektor pendidikan dan perbaikan peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pintu masuk dalam

kerangka perbaikan kualitas tenaga kerja sehingga mampu berkompetisi dalam pasar tenaga kerja terutama berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja oleh investor di Provinsi NTT.

3.4. Sarana Prasarana dan Aksesibilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang pembangunan suatu wilayah. Dalam penyediaan sarana dan prasarana di NTT, untuk daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana relatif memadai, kebijakannya adalah penyerasian dan pengoptimalan pemanfaatan sedangkan untuk daerah-daerah yang sarana dan prasarananya kurang memadai kebijakannya adalah meningkatkan status sarana dan prasarana yang ada serta memperluas jangkauan pelayanan sehingga memudahkan perkembangan pertumbuhan investasi di Provinsi NTT.

a. Transportasi Darat, Laut dan Udara

Sesuai dengan posisi geografisnya, transportasi massal yang potensial dikembangkan di NTT adalah transportasi darat untuk internal wilayah dan transportasi laut untuk akses antar pulau dan ke luar wilayah NTT. Di NTT, transportasi udara masih dalam jumlah terbatas dan lebih dominan untuk mendukung akses ke luar wilayah NTT. Pembangunan di bidang transportasi diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara termasuk peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, terminal, pelabuhan dan bandara.

1) Transportasi Darat.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat di NTT membutuhkan biaya relatif besar disebabkan kondisi topografinya sebagian besar memiliki tingkat keterlerengan curam dan berbukit. Selain itu, transportasi darat hanya dapat berfungsi optimal pada pulau yang besar karena secara geografis NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga hubungan darat kurang efektif. Transportasi darat antar kabupaten, kecamatan dan desa masih terbatas karena kurangnya sarana dan prasarana jalan.

Tabel 3.8**Status dan kondisi jalan (km) di Provinsi NTT**

Status	Beraspal	Tanah	Total
Jalan Negara	1.251,22	88,80	1.340,02
Jalan Provinsi	1.999,37	694,26	2.683,63
Jalan Kabupaten	15,896,57	1.553,90	17.450, 47
Jumlah	19.147,16	2.335,96	21.474,12

Data menunjukkan bahwa lebih dari 80% jalan di NTT telah beraspal, sedangkan yang belum beraspal terutama adalah jalan kabupaten sebagai penghubung antar kecamatan. Jalan Negara yang belum beraspal berada di Kab. Malaka yang baru terbentuk dan sementara membuka jalan negara. Jalan aspal yang relative tinggi dibangun hanya di Kota/Kabupaten Kupang sebagai daerah penyangga ibukota provinsi sedangkan di beberapa kabupaten bahkan terjadi penurunan. Di beberapa kabupaten, jalan aspal sangat sedikit. Beberapa wilayah masih relatif terisolir dan tertinggal dibanding dengan wilayah lainnya.

Tidak ada perbaikan yang signifikan, kondisi jalan dalam 10 tahun terakhir bahkan cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Panjang jalan yang termasuk kategori baik menurun. Jumlah jalan yang termasuk kategori rusak dan rusak berat meningkat. Kerusakan jalan tersebut terjadi hampir merata di setiap kabupaten kecuali di Kota Kupang, Kabupaten Belu dan Flores Timur. Penurunan sarana dan prasarana jalan disebabkan oleh kurangnya dana pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan terutama sejak desentralisasi.

Sarana dan prasarana jalan belum didukung oleh sarana dan prasarana jembatan dan terminal yang memadai.

Tabel 3.9**Jumlah Kendaraan Bermotor di NTT**

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Type A	24.918
2.	Type B	1.390
3.	Type C	924
4.	Type D	124
5.	Type E	402.345

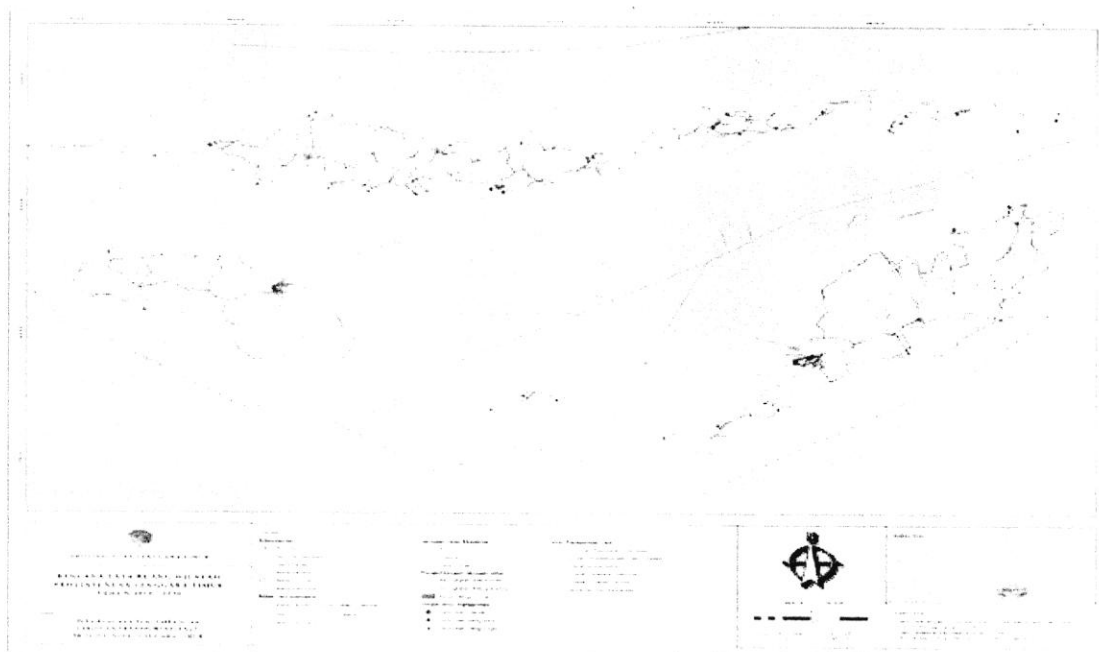
Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kendaraan di NTT mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jumlah sepeda motor (type E) mengalami peningkatan sekitar tiga kali lipat, Jeep/sedan (type A) mengalami kenaikan sekitar 40%, mini bus/mikro bus (type B) lebih dari 50%. Jenis kendaraan truk, pick up dan mobil tangki (type C) naik lebih dari 25%. Walaupun demikian, pertumbuhan jumlah kendaraan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan sarana dan prasarana jalan sehingga dalam 10 tahun terakhir terjadi peningkatan kemacetan lalu lintas terutama di kota-kota dan akan semakin meningkat pada 20 Tahun mendatang.

2) Transportasi Laut.

Sebagai wilayah kepulauan, transportasi yang cukup potensial yang dikembangkan di NTT adalah transportasi laut, karena peranan transportasi laut mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum biasa disinggahi kapal Pelni, kapal perintis dan jenis kapal lainnya karena kondisi pelabuhannya yang belum memadai. Sampai saat ini, transportasi laut belum banyak berperan dalam mendorong import- ekspor dan masih ada ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi laut antar kabupaten.

Gambar 3.3

Peta Jaringan Transportasi Laut di NTT



Sumber : Dinas Perhubungan Prov. NTT

Tabel 3.10**Transportasi Laut di NTT**

No	Indikator	Perintis	Komersil	Total
1	Jalur/lintasan	28	14	42
2	Perjalanan	918	1.785	2.703
3	Penumpang (org)	19.734	314.740	334.474
4	Kendaraan (unit)	102	5.525	6.006
5	Barang (ton)	5.082	10.346	10.766

Peranan transportasi laut dalam perekonomian NTT diperkirakan akan semakin penting dalam 20 tahun mendatang terutama dalam perdagangan antar pulau, provinsi dan negara. Hal ini sesuai dengan posisi geografi NTT sebagai provinsi kepulauan dan dekat dengan beberapa negara tetangga. Peluang yang dapat dikembangkan di masa mendatang adalah meningkatkan transportasi laut dari berbagai wilayah di NTT ke berbagai wilayah di Negara Timor Leste untuk meningkatkan volume perdagangan, dan membuka jalur transportasi laut dari beberapa wilayah di NTT dengan beberapa wilayah di Australia untuk mendukung ekspor terutama hasil-hasil pertanian.

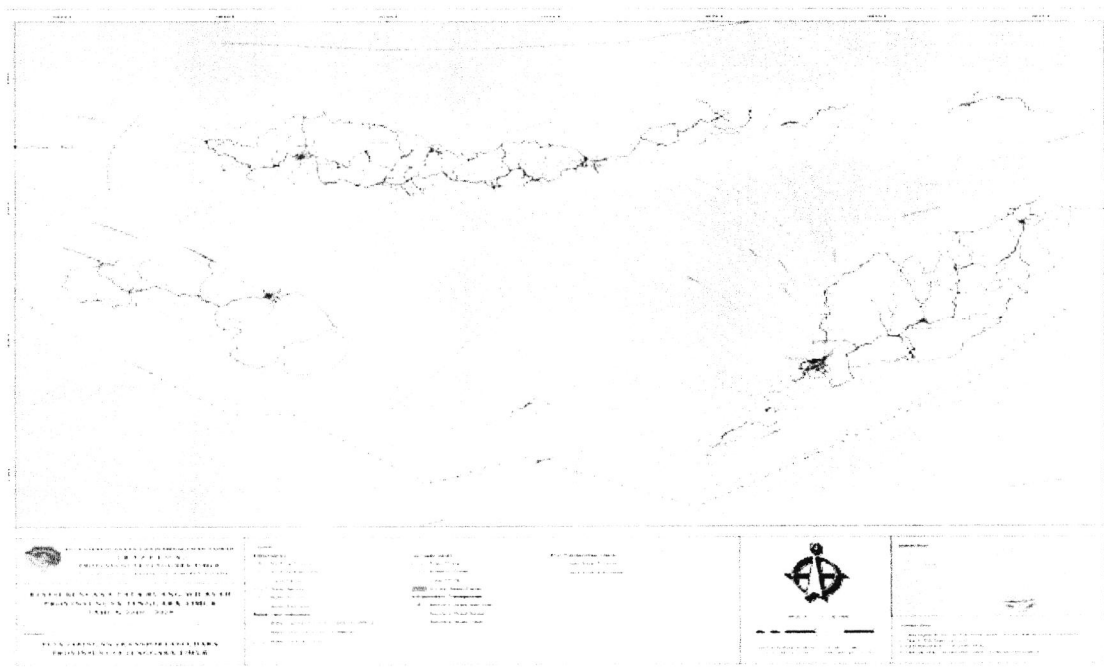
Mengingat peranan transportasi laut yang sangat strategis dan potensial di NTT, diproyeksikan bahwa pada 20 tahun mendatang perlu meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut, termasuk pengadaan berbagai jenis kapal modern untuk meningkatkan arus penumpang dan barang dari dan ke NTT. Arus kunjungan berbagai jenis kapal: PELNI, PELRA dan jenis kapal lainnya pada pelabuhan di NTT diperkirakan akan meningkat. Peranan transportasi laut dalam mendukung ekspor produksi NTT diperkirakan penting mengingat adanya posisi NTT terutama yang dekat dengan negara Timor Leste dan Australia.

3) Transportasi Udara

Transportasi udara di NTT secara umum belum berkembang. Jumlah pesawat yang masuk dan keluar NTT masih relatif rendah. Selain itu, masih terdapat beberapa daerah/bandara yang cukup rendah dilalui oleh pesawat.

Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara masih rendah. Pengangkutan komoditi lingkup intra provinsi maupun antar provinsi melalui pesawat udara masih rendah. Sarana dan prasarana bandara masih kurang dan dominan merupakan bandar udara yang sedang berkembang yang secara finansial belum mandiri. Jalur penerbangan ke beberapa wilayah di negara tetangga potensial khususnya ke Timor Leste dan Australia juga belum berkembang.

Gambar 3.4
Peta Jaringan Transportasi Udara



Sumber : Dinas Perhubungan Prov. NTT

Tabel 3.11
Jumlah Bandara dan Kemampuan Pelayanan Pendaratan di Prov.
NTT

No	Nama dan Lokasi Bandar Udara	Klas.	Panjang	Lebar	Kemampuan
1.	El Tari / Kupang	I	2.500	45	B-737
2.	Wai Oti / Maumere	III	1.850	30	F-28 Series
3.	Ir. Umbu Mehang Kunda/Waingapu	III	1.710	30	F-28 Series
4.	Satar Tacik / Ruteng	IV	1.150	30	DHC-6/C-212
5.	Tambolaka / Waikabubak	IV	1.650	30	F27-Series
6.	H. Aroeboesman / Ende	IV	1.650	30	F-28 Series/F-27
7.	Komodo / Labuhan Bajo	IV	1.400	30	F-27
8.	So'a / Bajawa	V	900	23	DHC-6/C-212
9.	Mali / Alor	V	1.435	23	DHC-6/C-212
10.	Haliwen / Atambua	V	900	30	DHC-6/C-212
11.	Gewayantana / Lantaka	V	900	30	DHC-6/C-212
12.	Lekunik / Rote	V	900	23	DHC-6/C-212
13.	Tardamu / Sabu	V	900	23	DHC-6/C-212
14.	Wonopito / Lewoleba	V	900	23	DHC-6/C-212

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. NTT

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pesawat yang datang dan berangkat melalui bandara NTT hanya sedikit bertambah, bahkan pada periode Tahun 1996 - 2003 menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.12
Arus Transportasi Udara di 14 Bandara NTT tahun 2014

No	Indikator	Datang	Berangkat
1	Kunjungan Pesawat	22.176	22.195
2.	Arus Penumpang (org)	1.085.990	1.137.909
3.	Arus Barang (kg)	4.767.242	2.758.706

Secara umum, bandara udara yang relatif padat disinggahi pesawat di NTT adalah bandara udara El Tari - Kupang, Mali - Alor, Wai Oti - Sikka, Mauhau - Sumba Timur dan Komodo -Mangarai Barat. Sedangkan bandara lainnya relative rendah. Dari sejumlah bandara di NTT, yang cukup pesat berkembang dalam 10 tahun terakhir adalah bandar udara Mali, Mauhau dan Komodo, di mana jumlah pesawat yang datang dan pergi meningkat tajam bila dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sedangkan bandar udara lainnya relatif konstan dan bahkan sebagian menurun.

Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di NTT juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Volume bongkar muat barang melalui pelabuhan udara di NTT terutama melalui bandar udara El Tari Kupang, Wai Oti dan Mali, sedangkan bandara lainnya relatif tidak berkembang.

b. Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi

Kondisi iklim NTT relatif kering dan curah hujan terbatas sehingga sumberdaya air pun terbatas. Permasalahan utama di bidang akses terhadap air bersih adalah bahwa air yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan atau tidak sesuai dengan peningkatan kebutuhan. Banyak rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih (air minum yang berasal dari air mineral, leding atau PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung). Banyak yang tidak mendapat layanan air minum perpipaan. Kemampuan PAM untuk menyediakan air, untuk menemukan sumber air baru, serta meningkatkan debit air masih terbatas. Air yang ada pun kurang dimanfaatkan secara efisiensi oleh PAM. Kemampuan PDAM dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan dan sumberdaya air juga masih terbatas. Harga air bersih belum terjangkau masyarakat sehingga jumlah pelanggan air minum masih rendah.

Data BPS NTT Tahun 2015 menunjukkan rumah tangga pelanggan PDAM di NTT baru 12,16%, dan sebagian besar rumah tangga di NTT (31.55%) saat ini menggunakan sumber air minum dari mata air, sumur dan sungai.

Kondisi sanitasi lingkungan umumnya masih rendah, terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Jumlah rumah tangga yang tidak dapat memiliki akses terhadap sanitasi yaitu tidak memiliki kamar mandi sendiri atau tidak dapat memanfaatkan fasilitas kamar mandi umum cukup tinggi. Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah untuk menangani sampah juga masih terbatas terutama di kawasan perkotaan.

Jika konservasi tidak dilakukan, maka NTT rawan terhadap krisis air bersih. NTT merupakan wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan musim hujan sedangkan

8 bulan adalah musim panas sehingga sumber-sumber mata air kering. Banyaknya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat karena sebagian besar masyarakat mengkonsumsi air yang tidak higienis yang mengakibatkan diare dan penyakit menular, khususnya penyakit kulit menjadi penyakit tahunan pada musim penghujan. Selain itu, minimnya ketersediaan air dapat mengurangi minat usaha di NTT.

c. Kelistrikan

Data BPS NTT Tahun 2015 menunjukkan persentase rumah tangga di NTT yang telah menggunakan listrik (PLN dan non PLN) adalah 74,20%. Sedangkan sumber listrik yang dibangkitkan oleh PLN sebesar 724.708,91MWH. Jumlah pelanggan PLN se NTT sebanyak 618.330 pelanggan

Permasalahan dalam pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik adalah luasnya wilayah berbentuk kepulauan dengan kepadatan penduduk bervariasi sehingga menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan yang efisien. Ada kesulitan geografis sehingga beberapa wilayah sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Ketergantungan pembangkit listrik terhadap BBM di NTT sangat besar karena penggunaan sumber energi lainnya seperti energi matahari, arus laut, tenaga angin dan lain-lain - belum berkembang.

Di masa mendatang, pembangunan di bidang kelistrikan perlu memberi peluang bagi swasta, pemerintah daerah, masyarakat dan lainnya dalam pembangunan pembangkit listrik, terutama listrik non BBM. Ketergantungan pada pembangkit listrik BBM perlu diperkecil melalui penggunaan energi matahari, biodiesel, panas bumi, hidro gas, batubara, gelombang atau sumber energi lainnya yang potensial di NTT. NTT berpeluang meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik terutama pembangkit listrik non BBM. Sesuai dengan kondisi klimatologi NTT dan luasnya laut NTT, penggunaan energi surya, gelombang laut dan angin sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini akan dapat mengatasi luasnya wilayah NTT yang berbentuk kepulauan dengan kepadatan penduduk bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan PLN konvensional.

d. Permukiman

Permasalahan di bidang sarana dan prasarana pemukiman terletak pada masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan banyak rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan terutama di pedesaan dan kawasan pesisir pantai. Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah sendiri yang sehat dan layak huni atas kemampuannya sendiri masih rendah.

Dari jumlah rumah tangga yang memiliki rumah, diperoleh bahwa jumlah rumah tangga yang mempunyai rumah dengan jenis lantai terluas terdiri dari tanah sangat tinggi yaitu mendekati 50% dari jumlah yang memiliki rumah dan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Dari 881.120 rumah tangga pada tahun 2004 sebanyak 403.463 rumah tangga mempunyai rumah yang lantainya sebagian besar terdiri dari tanah.

Dalam 10 tahun terakhir, walau jumlah rumah yang dibangun meningkat setiap tahun, peningkatan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan sesuai pertambahan penduduk. Pada tahun 1997, ada 716.638 rumah yang dibangun, dan hanya meningkat menjadi 881.120 rumah pada tahun 2004. Dari rumah tersebut dominan mempunyai luas < 50 m². Dari 881.120 rumah pada tahun 2004 lebih dari 600.000 rumah memiliki luas < 50 m² dan lebih dari 90% rumah di NTT mempunyai luas di bawah 100 m².

Dari seluruh rumah yang ada di NTT, sekitar 80% mempunyai atap terbuat dari seng, sisanya terbuat dari dedaunan, ijuk, sirap dan hanya sebagian kecil beratap genteng atau beton. Dari data Tahun 2004, kebanyakan rumah di NTT mempunyai dinding terbuat dari bambu, disusul tembok dan kayu sedang lainnya terbuat dari bahan murah lainnya. Proporsi ini relatif tidak berubah dalam 10 tahun terakhir. Dalam 10 tahun terakhir, walau terjadi pertumbuhan rumah tembok batu, namun pertumbuhan ini tidak signifikan karena rumah bertembok bahan murah lainnya juga meningkat.

e. Telekomunikasi/Telematika

Dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan penggunaan berbagai jenis sarana dan prasarana telekomunikasi dan

informasi, mulai dari penggunaan telepon, internet, televisi, radio dan lain-lain. Walau demikian, akses terhadap Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi ini hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil penduduk, umumnya yang tinggal di perkotaan. Secara umum akses terhadap telekomunikasi/telematika tersebut belum terjangkau ekonomi masyarakat. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang telekomunikasi/telematika tersebut juga masih terbatas. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah pelanggan telepon swasta mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 10.250 pelanggan pada tahun 1994 menjadi 36.562 pada tahun 2004. Jumlah pelanggan telepon pemerintah mengalami kenaikan, yaitu dari 1.988 pelanggan pada tahun 1994 menjadi 2.525 pada tahun 2004. Walau demikian, jumlah pelanggan telepon tersebut sebagian besar hanya terdapat di Kota/Kabupaten Kupang. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kantor pos hanya sedikit mengalami kenaikan yaitu dari 92 buah pada tahun 1994 menjadi 127 buah pada tahun 2004. Kantor pos tersebut kebanyakan terdapat di kota/kabupaten Kupang, yaitu dari 127 kantor pos sebanyak 23 berada di kota/kabupaten Kupang. Penyebaran kantor pos di kabupaten lainnya relatif merata kecuali di kabupaten Lembata, Rote Ndao dan Manggarai Barat yang masing-masing baru mempunyai satu kantor pos. Dalam 20 tahun mendatang, diperkirakan pemanfaatan telekomunikasi, Teknologi Informasi (TI), penyiaran dan lain-lain di NTT akan meningkat pesat. Investasi dalam penyediaan infrastruktur telematika, terutama swasta, diperkirakan akan meningkat. Saat ini terdapat sejumlah wilayah potensial di NTT yang belum dikembangkan dan cukup menarik dalam investasi. Selain itu, akibat semakin berkembangnya perekonomian NTT, kebutuhan akan teknologi telekomunikasi dan telematika juga meningkat.

f. Sumberdaya Air dan Irigasi

Tujuan pembangunan di bidang sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi adalah untuk meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan luas lahan beririgasi dan meningkatkan intensitas tanam. Dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk, maka meningkat pula permintaan akan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi permintaan tersebut,

perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas tanam diperlukan.

Salah satu permasalahan di NTT adalah terbatasnya luas lahan beririgasi sehingga hasil pertanian dan pendapatan petani rendah. Di sisi lain, jumlah lahan tidur dan lahan kritis cukup besar yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan produktif, namun belum dapat dimanfaatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana sumberdaya air dan irigasi seperti embung, bendungan dan jaringan irigasi lainnya.

Belum optimalnya program embung kecamatan dan desa, dan program seribu embung yang dicanangkan untuk meningkatkan luas areal tanam dan intensitas tanam dan penyediaan air minum. Dana pembangunan dan pemeliharaan bendungan, embung dan saluran irigasi terbatas. Selain itu, usaha untuk melindungi kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai untuk mendukung ketersediaan sumberdaya air belum optimal. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam hal luas panen dan produksi padi di NTT.

Total lahan yang diairi (irigasi teknis, irigasi semi teknis, irigasi sederhana, tadah hujan dan pasang surut) dalam 10 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Lahan yang diairi di NTT sejak Tahun 1994 sampai 2004 dominan di Kota/Kabupaten Kupang, Manggarai, Sumba Barat dan Sumba Timur sedang di kabupaten lainnya relatif kecil. Sampai dengan tahun 2005, jumlah embung kecil yang sudah dibangun di NTT sebanyak 334 buah dengan daya tampung 8.318.112 m³, embung irigasi sebanyak 24 buah dengan daya tampung 4.222 m³ untuk mengairi lahan areal irigasi seluas 4.222 Ha.

g. Sarana Kesehatan

Permasalahan di bidang sarana dan prasarana kesehatan di NTT terletak pada kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain-lain yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan kesehatan. Satu rumah sakit melayani sekitar 119.913 orang. Selain itu, kapasitas tempat tidur di rumah sakit masih terbatas.

3.5. Kekayaan Sumber Daya Alam

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan sumber daya alam yang tersebar di seluruh kabupaten/kota sebagai keunggulan kompetitif sekaligus sebagai peluang investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Investasi di NTT diarahkan pada optimalisasi 6 potensi unggulan yang diimplementasikan ke dalam 6 tekad pembangunan yaitu :

- 1) NTT sebagai Provinsi Jagung;
- 2) NTT sebagai Provinsi Ternak;
- 3) NTT sebagai Provinsi Cendana;
- 4) NTT sebagai Provinsi Koperasi;
- 5) NTT sebagai Provinsi Perikanan dan Kelautan;
- 6) NTT sebagai Provinsi Pariwisata.

Berbagai potensi yang dapat dikelola secara investasi di Nusa Tenggara Timur antara lain :

- 1) Perikanan dan Kelautan :
 - a) Budidaya Rumput Laut Kabupaten Kupang, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao. Total Lahan : kurang lebih = 50.300 Ha
 - b) Budidaya Mutiara Kabupaten Kupang, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur dan Rote Ndao.
 - c) Potensi penangkapan ikan di Nusa Tenggara Timur :
 - 1) Perikanan Air Laut : Cakalang, Tuna, Tongkol, Tenggiri, Pelagis Besar, Pelagis Kecil, Lobster, Cumi-cumi, Udang, Demersal, Penaid, Ikan karang, Kerapu dan Teripang.
 - 2) Perikanan Air Payau : Bandeng dan Udang.
 - 3) Perikanan Air Tawar : Mujair, Karper, Lele, Ikan mas dan Nila.
 - d) Industri Garam

Peluang industri garam di Nusa Tenggara Timur antara lain:

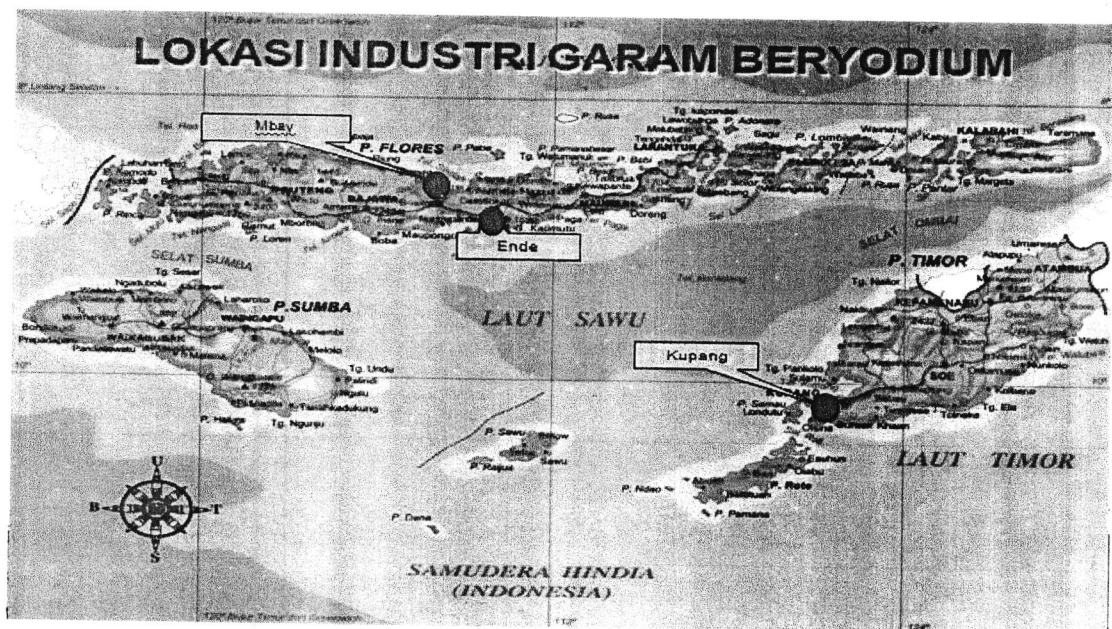
- 1) Kabupaten Kupang (2.000 Ha). Terdapat dukungan industri garam rakyat yang telah berkembang Prasarana pendukung industri garam beryodium Penyerapan tenaga kerja sekitar 2.500 orang Proyeksi produksi (NaCl 94,7%) = 200.000 Ton/tahun Investasi

pembangunan Rp. 225 Milyar

- 2) Kabupaten Nagekeo (Mbay-kiri) (1.200 Ha). Terdapat dukungan industri garam rakyat yang telah berkembang Prasarana pendukung industri garam beryodium Penyerapan tenaga kerja sekitar 2.000 orang Proyeksi produksi (NaCl 94,7%) = 120.000 Ton/tahun Investasi pembangunan Rp. 112 Milyar
- 3) Kabupaten Ende (Wewaria) (1.000 Ha). Terdapat dukungan industri garam rakyat yang telah berkembang Prasarana pendukung industri garam beryodium Penyerapan tenaga kerja sekitar 1.500 orang Proyeksi produksi (NaCl 94,7%) = 100.000 Ton/tahun Investasi pembangunan Rp. 150 Milyar

Gambar 3.5

Peta Lokasi Industri Garam



Sumber : Dinas Perhubungan Prov. NTT

2) Perkebunan

- a) Kakao : Kabupaten Flores Timur, Sumba Barat dan Belu
- b) Jambu Mete : Kabupaten Flores Timur, Sikka, Belu dan Ngada
- c) Cengkeh : Kabupaten Manggarai dan Ngada
- d) Kopi : Kabupaten Ngada, Manggarai dan Flores Timur
- e) Kapas : Kabupaten Sumba Timur dan Sikka
- f) Vanili : Kabupaten Manggarai, Ngada dan Sumba Barat

3) Pertanian

- a) Kacang hijau : Kabupaten Belu dan Ngada
- b) Jagung : Pulau Timor/Rote dan Sumba
- c) Kacang Tanah : Kabupaten Rote, Sumba Timur dan Belu

4) Kehutanan

- a) Kutulak : Kabupaten Manggarai, Ngada dan Sumba Barat
- b) Sitlak : Kabupaten Alor, Sumba Timur dan Sumba Barat

5) Peternakan

- a) Sapi : Daratan Timor, Rote, Sumba dan (Flores sebagai pertumbuhan baru)
- b) Babi : Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Ngada, Matim, Manggarai, Mabar
- c) Kambing/domba : Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Flores Timur
- d) Ayam/ Itik : Kabupaten

6) Pertambangan

- a) Marmer : Kabupaten TTS, TTU dan Belu
- b) Mangan : Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Manggarai
- c) Emas : Kabupaten Sumba, TTS dan Manggarai

7) Pariwisata

- a) Wisata Alam
 - 1) Danau Kelimutu : Kabupaten Ende
 - 2) Komodo : Kab. Manggarai Barat
 - 3) Air Panas Bumi : Kab. Ngada
- b) Wisata Pantai
 - 1) Pantai Lasiana : Kota Kupang
 - 2) 17 Pulau Riung : Kab. Ngada
 - 3) Selancar di Nembrala : Kab. Rote Ndao
 - 4) Pulau Bidadari dan Pulau Rinca : Kab. Manggarai Barat
 - 5) Pulau Menggudu : Kab. Sumba Timur
 - 6) Pantai Merosi : Sumba Barat
- c) Wisata Bawah Laut
 - 1) Pulau Kepa : Kab. Alor
 - 2) Taman Laut 17 Pulau Riung : Kab. Ngada
 - 3) Taman Laut Komodo : Kab. Manggarai Barat
 - 4) Taman Laut Paga Batang : Kab. Sikka dan Alor

d) Wisata Budaya

- 1) Pasola Tarung an Laitarung : Kab. Sumba Barat
- 2) Perburuan Ikan Paus : Kab. Lembata
- 3) Upacara Religi Samana Santa Jumat Agung : Kab. Flores Timur
- 4) Tari Caci : Kab. Manggarai
- 5) Hole Mehara : Kab. Sabu Raijua
- 6) Makam Raja-raja (megalitik) : Kab. Sumba
- 7) Suku Boti : Kab. TTS

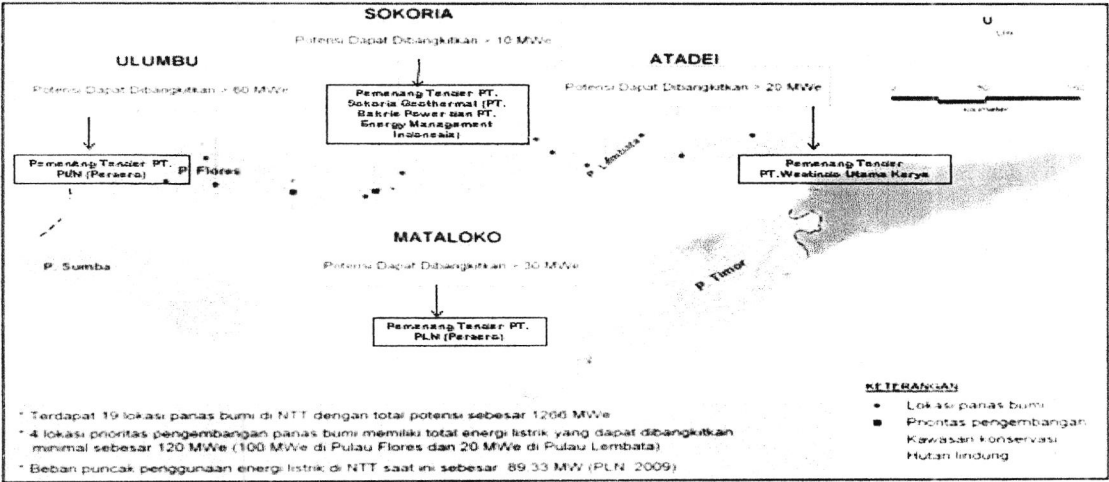
e) Eko Wisata

- 1) Danau Kelimutu Tiga Warna : Kab. Ende
- 2) Lingko : Kab. Manggarai
- 3) Kawasan Gunung Mutis : Kab. TTS – So'e
- 4) Pantai Kolbano : Kab. TTS – So'e

8) Potensi Panas Bumi dan Pengusahaan

NTT memiliki potensi panas bumi sebesar 1.266 MW tersebar di 19 lokasi, sejumlah 16 lokasi berada di pulau Flores. Saat ini telah dilakukan eksplorasi pada dua lokasi panas bumi yaitu Mataloko dan Ulumbu. Potensi Ulumbu sebesar 200 MW, diantaranya cadangan terbukti sebesar 12,5 MW. Mataloko memiliki potensi 63 MW dengan cadangan terbukti baru sebesar 2,5 MW. Sebesar 1,5 MW telah dibangkitkan menjadi tenaga listrik oleh PLN, diluar Flores terdapat WKP Atedai. Satu lokasi yaitu Sokoria, telah ditenderkan dan IUP telah ditetapkan, namun hanya untuk skala kecil sebesar 2x2,5 MW. Potensi yang dimiliki sebesar 170 MW.

Gambar 3.6
Peta Lokasi Potensi Panas Bumi



9) Potensi Unggulan di bidang pertambangan

a) Mineral Logam

No	Jenis	Kadar	Lokasi
1	Mangan	30-40 %	Timor
		45-50 %	Flores
2	Emas	1,95 g/T	Alor, Flores dan Sumba
3	Biji Besi	50 %	Flores dan Sumba
4	Galena	60-70 %	Alor, Lembata dan Sumba
5	Tembaga	-	Alor, Flores dan Timor
6	Barit	-	Manggarai
7	Nikel	1.000-2.000 ppm	Timor
8	Titan Platina	Fe=51 %, Titan=7,15 %	Ende
9	Kromit	-	TTU

b) Mineral Bukan Logam

No	Jenis	Lokasi
1	Pasir Kuarsa	Timor, Flores dan Alor
2	Zeolith	Ende
3	Kaolin	Ende, Nagekeo dan Alor
4	Gypsum	Timor, Rote, Alor dan Flores Timur

c) Batuan

No	Jenis	Lokasi
1	Marmer dan Batu	Timor, Flores dan Alor
2	Granit	Sumba Timur
3	Batu Apung	TTU, Ende, Nagekeo dan Ngada
4	Batu Warna	Kupang, TTS, Alor dan Ende
5	Kristal Kuarsa	Manggarai Barat

d) Batu Bara, Panas Bumi dan Minyak/Gas

No	Jenis	Lokasi
1	Batu Bara	Sumba dan Flores (terindikasi)
2	Panas Bumi	Manggarai, Ngada, Ende, Lembata dan Alor. 19 Lokasi : 2 Lokasi PLTP (Ulumbu dan Mataloko),
3	Minyak dan Gas	Blok West Timor (PT. Eni West Timor) dan Blok

e) Energy baru terbarukan

No	Jenis	Keterangan/Lokasi
1	Energy Surya	Terpusat dan SHS (Solar Home
2	Energy Air	PLTA (Sumba Barat dan Manggarai) dan PLTMH (TTS, Alor, Ende, Ngada, Sumba Timur dan Manggarai)
3	Energy Angin (bayu)	Kupang, TTS, Rote Ndao, Flores Timur, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Sumba Timur, Sumba Barat dan Alor
4	Energy gelombang dan arus laut	Potensi gelombang = 10-20 KW/m.gel hingga 70 KW/m. gel. (selat Larantuka di Flores Timur dan selat pantar di

10) Potensi Lahan

- Potensi pertanian lahan kering 1.528.308 Ha dengan tingkat pemanfaatan 54,62 %
- Lahan belum diusahakan 751.185 Ha
- Potensi perkebunan luas 888.931 Ha dengan tingkat pemanfaatan 35,45 %
- Potensi padang penggembalaan 832.228 Ha

3.6. Penawaran Kegiatan Investasi di NTT

JenisInvestasi	BidangUsaha
Perkebunan	Kakao,Kopi dan Jambu Mete
Kelautandan Perikanan	Budidayamutiara,rumputlautdanikantangk
Peternakan	Pengembanganternaksapi,kambingdanbabi
Industri	Pabriksemen,Pabrik Pakan,Pengalengan Dagingdanikan
Pariwisata	Pembangunanhotel,obyekwisatapulauecil Danpakettour
Transportasi	Maskapaipenerbangandankapalcepat
Pertambangan dan Energi	Pertambanganmangan,marmer danenergi terbarukan (listriktengasurya, angin)

1) BidangUsaha PertanianandanPerkebunan

No	Jenis	Tingkat KajianIdentifikasi	FS	Lokasi
1	Jagung	a. Potensi lahan > 500.000 ha b. Produksi 500.000–700.000 ton/tahun		Sumba,Timor Dan Flores bagian timur
2	Kakao	a. Potensi lahan > 150.000 Ha b. Produksi 10.000– 15.000 ton/tahun c. Pasarnasional dan ekspor	v	Sikka,Ende, Ngada, Nagekeo, Sumba Barat Daya danBelu
3	Jambu Mente	a. Potensi lahan > 750 Ha b. Produksi 40.000–50.000 ton/tahun c. Pasarnasionaldaneskpor	v	Sumba,Timor Dan Flores bagian timur
4	Jerukke prok	a. Potensi lahan> 10.000Ha b. Rata rata Produksi 8.000ton/tahun a. Pasar local dan nasional	v	TTS dan TTU
5	Kapas	a. Potensilahan 850 Ha b. Produksin 387–400ton c. Pasar dalam negeri	v	SumbaTimur
6	Minyak Zaitun	a. Potensi lahan 1.000 Ha b. Produksi 1.000 ton/tahun		Manggarai, Mabart dan Bajawa

No	Jenis	Tingkat Kajian Identifikasi	FS	Lokasi
7	Ubi Kayu	a. Potensi lahan > 150.000 Ha b. Produksi 900.000 – 1.200.000 ton/tahun	v	Sumba, Timor dan Flores bagian timur

2) Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan

No	Jenis Investasi	Tingkat Kajian Identifikasi	FS	Lokasi Kegiatan
1	Rumput Laut	a. Produksi kering tahun rata-rata 713 ribu ton b. Kebutuhan nasional per tahun mencapai > 35.000 ton	v	Sikka, Alor, Lembata, Sumba Timur, Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Nagekeo, Manggarai
2	Perikanan	a. Potensi 200.000 km2 dgn panjang garis pantai 5.700 km Sumber daya hayati perikanan yg besar sekitar 240.000 ton/tahun, potensi tambak 1.830 Ha b. Pasar lokal, nasional dan ekspor	v	Flores Timur, Sikka, Lembata, Ende, Alor, Rote Ndao, Nagekeo, Belu dan Kota Kupang
3	Garam	a. Potensi 1.000 – 6.000 Ha b. Produksi garam rakyat c. Potensi pasar garam	v	Teluk Kupang, Wewaria dan Nagekeo

3) Bidang Usaha Peternakan

No	Jenis Investasi	Tingkat Kajian Identifikasi	FS	Lokasi Kegiatan
1	Ternak Sapi	a. Lahan untuk pembibitan b. Lokasi pengembangan Mini Ranch c. Populasi 600.000 – 800.000 ekor	v	Sumba, Timor dan Flores bagian timur

No	Jenis Investasi	Tingkat Kajian Identifikasi	FS	Lokasi Kegiatan
2	Ternak Babi	a. Lahan untuk pembibitan b. Lokasi pengembangan Mini Ranch c. Populasi 1,2 – 2,5 Juta	v	Sumba, Timor dan Flores

3.7. Rangka Institusi Pengambilan Kebijakan.

Kegiatan penanaman modal membutuhkan kerangka institusional pengambilan kebijakan yang terencana dan konsisten. Hal ini terkait dengan *transaction cost* (biaya transaksi) yang harus ditanggung oleh setiap pelaku bisnis, dimana semakin tinggi biaya transaksi akan menurunkan minat para pelaku bisnis untuk memulai suatu bisnis. Selain itu juga terkait dengan paket kebijakan untuk menarik investasi masuk yang melibatkan kebijakan sektoral dan antara pusat dan daerah.

Penciptaan iklim investasi yang menarik mutlak diperlukan untuk menarik investor dalam dan luar negeri. Survei yang dilakukan oleh Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2008 menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Daerah merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kelembagaan pelayanan penanaman modal, promosi investasi daerah, akses lahan usaha, keamanan usaha, infrastruktur, tenaga kerja, peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah dan kinerja ekonomi daerah,

Selain itu, alasan utama dibalik ketidakpastian usaha yang signifikan berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan daerah dalam menciptakan dan mempeertahankan iklim bisnis yang menarik. Hal tersebut membuat peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam menarik investor masuk ke daerah, untuk itu diperlukan konsistensi kebijakan yang probisnis antar pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah pusat. Sejak Januari 2001 Indonesia secara resmi mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan tersebut meliputi kewenangan ekonomi, politik dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.

Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut ditengarai akan memberikan dampak pada iklim usaha di daerah, dimana terjadi suatu dilema bagi pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi Pemda perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai pungutan dan ditambah dengan tuntutan dari kalangan bisnis lokal untuk memperoleh proteksi, disisi lain pemda perlu mengembangkan berbagai kebijakan untuk menarik investor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam sistem perencanaan pembangunan nasional telah secara jelas mampu memberikan deskripsi proses pengambilan kebijakan publik dan pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Beragam ketidakpastian dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah telah diminimalkan, karena itu diperlukan koodinasi dan konsistensi kebijakan peraturan di tingkat pusat dan daerah (vertikal) dan antar kementerian dan badan lainnya (horisontal). Selain itu dibutuhkan suatu penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Pada era demokrasi di Indonesia memungkinkan prinsip *good governance* ini dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja pemeberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah Indonesia

3.8. Tantangan Investasi di Provinsi NTT

Tantangan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti minimnya dukungan infrastruktur yang ditandai dengan tingginya biaya transportasi penumpang/kargo antar pulau, seringnya terjadi pemadaman listrik, suplai/stok BBM yang belum stabil serta terbatasnya akses ke lokasi-lokasi potensial, status kepemilikan lahan/tanah yang belum jelas ditandai dengan sering terjadinya okupasi/penyerobotan lahan dan duplikasi kepemilikan

lahan, kawasan yang tidak terkonsentrasi, dimana total luasan kawasan potensial didominasi oleh kolektivitas dari pencarian sejumlah kawasan yang luasnya terintegrasi di satu lokasi sehingga sering dinilai tidak ekonomis, Sumber daya manusia masih terbatasnya tenaga yang berkualitas.

A. Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan/Kehutanan dan Perikanan 35,15 %

Secara nasional NTT memiliki keunggulan, baik secara kompetitif (Peternakan dan Perikanan Kelautan) maupun secara komparatif (Perkebunan, Kehutanan dan Pertanian) yang ditandai oleh kontribusi sektor ini terhadap PDRB NTT Tahun 2013 sebesar 35,15 %, Sub sektor pangan berkontribusi sebesar 16,44 %, peternakan 10,38 %, perikanan 4,14 %, perkebunan 3,98 % dan kehutanan 0,22 %. Berdasarkan presentasi kontribusi di atas, diperoleh gambaran bahwa sub sektor pangan mendominasi nilai kontribusi, sedangkan yang terendah adalah sub sektor kehutanan. Kondisi ini merupakan peluang bagi pengembangan sub-sub sektor dimaksud guna peningkatan perekonomian NTT baik oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha (investor).

B. Sektor Pariwisata

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang menjadi keunggulan kompetitif pada tingkat nasional, khususnya sub sektor wisata alam (komodo, kelimutu), wisata religius (samana santa) dan wisata budaya (pasola, perkampungan adat, penangkapan ikan paus). Sedangkan sub sektor yang memiliki kenggulan komparatif namun belum dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian daerah antara lain diving dan surfing (Rote, Pulau Kera) Snorkeling, (Pink Beach, Pulau 17)

C. Sektor Pertambangan 1,34 %

Secara agregat sektor pertambangan Provinsi NTT bukan merupakan sektor yang menjadi keunggulan kompratif maupun kompetitif pada tingkat nasional. Akan tetapi hal itu bukan berarti tidak terdapat sama sekali sub sektor yang tidak memiliki keunggulan. Sub sektor penggalian merupakan sub sektor yang cukup potensial, dimana sub sektor tersebut menjadi

satu-satunya sub sektor pada sektor pertambangan yang menjadi keunggulan komparatif Provinsi NTT pada tingkat nasional. Sub sektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian batu- batuan, pasir, tanah, gamping, tanah liat dan kerikil hias yang umumnya berada di permukaan bumi. Komoditas sub sektor ini adalah Biji mangan, pasir besi, emas, batu marmer dan komoditi penggalian lainnya.

Pada tingkat daerah kabupaten/kota di Provinsi NTT sub sektor penggalian menjadi keunggulan komparatif sekaligus kompetitif pada sebagian besar daerah kabupaten/kota antara lain Kab. Kupang, TTS, TTU, Belu, Ende, Ngada, Sumba Tengah, sumba Barat Daya, Sumba Timur, Alor, Manggarai, lembata, Flotim, Sikka dan Rote Ndao.

D. Sektor industri Pengolahan 1,46%

Sektor industri pengolahan di Provinsi NTT memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Walaupun secara agregat sektor ini bukan merupakan sektor yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan perkembangan sektor industri pengolahan masih bergantung pada ketersediaan bahan mentah dan bahan baku yang tidak tersedia secara kontinue.

E. Sektor Listrik dan Air Bersih 0,45%

Pada sektor listrik dan air bersih bukan merupakan sektor unggulan komparatif sekaligus kompetitif pada tingkat nasional. Namun hal itu bukan berarti tidak terdapat sama sekali sub sektor yang unggul. Sub sektor listrik di Provinsi NTT merupakan sub sektor yang memiliki keunggulan komparatif namun tidak kompetitif karena belum memanfaatkan sumber daya yang tersedia antara lain tenaga surya (PLT Surya), Angin (PLT angin) dan panas bumi (PLT Panas bumi). Sedangkan sub sektor air bersih, Secara umum Provinsi NTT masih mengalami kesulitan air bersih dan sangat bergantung pada sumber air permukaan (mata air dan sungai) dan menengah (sumur bor).

F. Sektor konstruksi (bangunan) 7,15 %

Kegiatan sektor ini berupa usaha pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan, serta perombakan dari suatu bangunan atau konstruksi lainnya. Bangunan yang dimaksud dapat berupa tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi lainnya termasuk kegiatan subkonstruksi pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendingin dan pemasangan saluran air. Dalam hal ini tercakup pula pembuatan dan perbaikan bangunan tempat tinggal yang dilakukan sendiri oleh rumah tangga, swasta ataupun badan-badan pemerintah. Sektor konstruksi Provinsi NTT bukan merupakan keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif pada tingkat nasional.

G. Sektor perdagangan, Hotel dan Restoran 18,33 %

Sub sektor utama pembentuk nilai tambah sektor perdagangan, hotel dan restoran di Provinsi NTT adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran. Pada lingkup wilayah kabupaten/kota di Provinsi NTT sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat menjadi keunggulan komparatif sekaligus kompetitif bagi beberapa daerah kabupaten/kota. Secara agregat, daerah-daerah kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif sekaligus keunggulan kompetitif pada sektor ini adalah Kota Kupang, Kabupaten Manggarai Barat, Sikka dll. Pada tingkat daerah kabupaten/kota lebih didominasi oleh sub sektor hotel dan restoran.

H. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 5,68 %

Secara agregat sektor pengangkutan dan komunikasi bukan merupakan keunggulan komparatif dan juga bukan merupakan keunggulan kompetitif Provinsi NTT pada tingkat nasional. Namun hal tersebut bukan berarti sektor pengangkutan dan komunikasi tidak unggul sama sekali, jika ditinjau pada masing-masing sub sektor maka terdapat beberapa sub sektor yang menjadi unggulan komparatif dan juga kompetitif Provinsi NTT pada tingkat nasional. sub sektor pengangkutan merupakan

sub sektor yang memiliki keunggulan baik komparatif sekaligus kompetitif, yang paling dominan pada sub sektor pengangkutan adalah angkutan laut. Letak geografis Provinsi NTT sebagai Provinsi Kepulauan dan berbatasan dengan dua Negara yaitu Australia dan Timor Leste sebagai pintu gerbang masuknya investasi serta memberikan keuntungan bagi angkutan laut. Kedepannya akan dikembangkan segitiga ekonomi antara Kupang-Darwin-Dili sehingga sangat potensial dalam pengembangan daerah NTT.

I. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,37%

Pada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di Provinsi NTT memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Walaupun secara agregat sektor ini bukan merupakan sektor yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif di tingkat nasional. Namun pada lingkup regional, Kota Kupang, Manggarai Barat dan Sikka memiliki potensi di sektor ini untuk dikembangkan pada sub sektor perbankan dan sewa bangunan sehingga dapat menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif pada tingkat nasional.

J. Sektor Jasa-Jasa 26,07 %

Sektor jasa-jasa bukan merupakan sektor yang menjadi unggulan, baik komparatif maupun kompetitif Provinsi NTT di tingkat nasional. namun demikian masih terdapat komoditas yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Sub sektor swasta khususnya komoditas jasa pendidikan, kesehatan merupakan potensi yang baik untuk dikembangkan di Provinsi NTT. Jika ditinjau dalam lingkup regional komoditas pembentuk nilai tambah sektor ini adalah jasa perorangan dan rumah tangga yang meliputi jasa reparasi/bengkel kendaraan bermotor, salon, tukang jahit dan lain-lain.

BAB IV
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

4.1 Arah kebijakan umum

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT merupakan kebijakan perencanaan sektoral jangka panjang yang bersifat implementatif di Provinsi NTT. RUPM Provinsi NTT secara khusus mengatur tentang berbagai rencana implementasi kebijakan-kebijakan yang lebih tinggi, secara khusus RUPM Nasional, yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan Provinsi NTT di sektor penanaman modal selama kurun waktu sejak dari ditetapkannya RUPM Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2025.

Secara umum, perencanaan pembangunan Nasional Indonesia berpedoman pada Rencana Umum Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dengan visi pembangunan nasional yaitu: Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, yang diwujudkan dalam 3 (tiga) misi utama, yaitu :

- a. peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- b. mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional.
- c. mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju *innovation-driven economy*.

Guna mempercepat pencapaian visi pembangunan nasional 2025, khususnya di bidang perekonomian, Pemerintah menetapkan Master-Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada tahun 2008 memfokuskan sistem konektivitas antar wilayah melalui sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah guna pemerataan pembangunan ekonomi nasional dengan menciptakan sentra produksi baru, untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang perekonomian Nasional. MP3EI menempatkan Bali, NTB dan NTT dalam koridor 5 pembangunan ekonomi yang ditumpukan pada pengembangan pariwisata, peternakan dan perikanan, dengan tema “Pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional”.

Sebagai aktualisasi perencanaan jangka panjang nasional di NTT, dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Pembangunan di Bidang perekonomian dan sektor penanaman modal dalam RPJP Provinsi NTT diarahkan kepada :

- a. Pembangunan perekonomian perlu diarahkan kepada pembangunan sektor primer, sekunder dan tersier yang terintegrasi dan saling mendukung.
- b. Pembangunan perilaku ekonomi perlu diupayakan ke arah yang lebih untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui upaya-upaya yang mendorong pergeseran perilaku produksi, investasi, menabung dan konsumsi ke arah yang lebih memungkinkan terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi.
- c. Pada aspek kapital, pembangunan diarahkan kepada peningkatan ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses pada lembaga keuangan mikro dan padat modal guna penguatan modal masyarakat miskin dan perdesaan.

d. perkuatan perekonomian domestik perlu dikembangkan guna mewujudkan masyarakat berdaya saing yang secara bertahap-berkelanjutan dilaksanakan melalui perbaikan efisiensi ekonomi, pereduksian ketimpangan ekonomi, penstabilan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan keterkaitan dengan kebijakan ekonomi internasional.

Pengimplementasian kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan daerah tersebut sedapat mungkin disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi yang dimiliki NTT, dengan memperhitungkan aspek kemampuan, kelemahan, dukungan dan tantangan yang ada baik secara internal maupun eksternal, guna merubah dan meningkatkan nilai keunggulan komparatif (yang pada umumnya diwarisi) menjadi keunggulan kompetitif (yang pada umumnya diciptakan). Berdasarkan peta potensi NTT maka dilakukan penghitungan dan analisis SWOT sebagai berikut :

Tabel 4.1
Analisis SWOT

ASPEK STRATEGIS	BOBOT	RATING	SCORE
Kekuatan (S)			
a. Posisi geografis sebagai daerah perbatasan	0.10	1	0,10
b. Ketersediaan lahan kosong melimpah	0.08	3	0,24
	0.12	4	0,48
Kelemahan (W)			
a. Iklim semi-arid dengan pulau yang tersebar	0.07	1	0.07
b. Kurangnya kejelasan pemilikan lahan	0.10	3	0.30
Aspek Internal	1.00	IE	2,40

ASPEK STRATEGIS	BOBOT	RATING	SCORE
Peluang (O)			
a. Keberpihakan pemerintah pusat	0.12	2	0,24
b. Tingginya animo investor untuk berinvestasi	0.10	3	0,30
c. Konektivitas wilayah yang baik (nasional dan internasional)	0.12	4	0,48
d. Kultur masyarakat yang survive dengan alam	0.10	3	0,30
e. Arus infomasi dan komunikasi yang meningkat	0.07	1	0,07
Tantangan (T)			
a. Tingginya tingkat persaingan komoditas dengan daerah tetangga NTT	0.10	2	0,20
b. Tingginya biaya produksi bagi penanaman modal	0.12	1	0,12
c. Kerusakan lingkungan hidup dan biota laut	0,07	4	0,28
d. Nilai realisasi Investasi yang masih rendah	0.10	3	0,30
e. Sebagian besar kebutuhan masyarakat dari luar daerah	0.10	2	0,20
Aspek Eksternal	1,00	IE	2,49

Berdasarkan analisis Matriks SWOT maka diperoleh nilai Internal Eksternal (IE) sebesar 2,40 dan 2,49 yang berarti kondisi Penanaman Modal Daerah NTT berada pada posisi pertumbuhan dan perlu pengembangan lebih lanjut.

Tabel 4.2
Nilai Internal Eksternal

skor eksternal	total	skor internal		
		Tinggi 4,0	Rata-rata 3,0	Rendah 2.0
	Tinggi 4,0			
	Sedang 3,0			
	Rendah 2.0			

Dalam gambar berikut terlihat bahwa secara grafis faktor internal yang memberi sinyal positif sebagai kekuatan penanaman modal Daerah secara akumulatif sedang, demikian pula faktor eksternal yang mendukung kegiatan penanaman modal di NTT relatif sedang dan masih berada pada level rata-rata.

Matriks skor internal dan eksternal tersebut juga dapat digunakan dalam mengidentifikasikan sumber daya yang dimiliki NTT dan pemanfaatannya dengan melihat tingkat ketersediaannya (Melimpah, sedang, minim) dan tingkat permintaan/kebutuhannya oleh masyarakat dan daerah NTT (banyak, sedang, kurang), sebagai berikut :

Tabel 4.3
Nilai Internal Eksternal Potensi Investasi

Permintaan Pasar	total	Ketersediaan Sumber Daya		
		Tinggi 4,0	Rata-rata 3,0	Rendah 2.0
	Tinggi 4,0			
	Sedang 3,0			
	Rendah 2.0			

Dalam menyusun roadmap (peta panduan) pengembangan investasi NTT, matrik ini akan digunakan untuk mengidentifikasikan sektor pengembangan investasi setiap Kabupaten/Kota di NTT. Berdasarkan perhitungan tersebut

perlu disusun arah dan strategi investasi NTT guna percepatan pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan daerah NTT, yang sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal Indonesia yang maju sesuai dengan amanat UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kebijakan pengembangan investasi NTT difokuskan pada sasaran strategis, sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sasaran Kebijakan Pengembangan Investasi NTT

NO	STRATEGI	TUJUAN AKHIR
1.	Meningkatkan penguatan IPM, kemudahan pelayanan dan perijinan investasi.	Terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.
2.	Mengembangkan potensi investasi berbasis kerakyatan.	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan rakyat yang mendukung produk unggulan investasi.
3.	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur pendukung investasi.	Terciptanya lapangan kerja, konektivitas wilayah bagi penyebaran investasi.
4.	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi baik dalam maupun luar negeri.	Adanya peningkatan investasi dan realisasi investasi di NTT.
5.	Mengembangkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan diversifikasi produk unggulan daerah.	Meningkatnya daya saing investasi daerah.

Sesuai dengan sasaran strategis dan tujuan akhir yang diharapkan sebagaimana hasil analisis SWOT maka dalam pembangunan perekonomian daerah melalui penanaman modal yang terpadu dan konsisten, Pemerintah Provinsi NTT berpedoman pada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang RUPM.

4.2 Arah 1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal meliputi :

a. Penguatan kelembagaan penanaman modal Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penguatan kelembagaan penanaman modal Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan upaya meningkatkan kemampuan Instansi Penanaman Modal dalam aspek pengorganisasian, pendelegasian kewenangan, tenaga aparatur yang berkualitas, ketersediaan sarana/prasarana kerja yang memadai, termasuk di dalamnya peningkatan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah dan non pemerintah guna mendukung investasi di NTT. Penguatan kelembagaan penanaman modal di NTT dilakukan sekurang-kurangnya dengan :

- 1) pembentukan Instansi Penanaman Modal yang mandiri di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT.
- 2) pendelegasian kewenangan bidang investasi kepada IPM termasuk penggabungan Instansi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) dengan IPM.
- 3) peningkatan peran lembaga penanaman modal di NTT untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitas yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di NTT.
- 4) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Vertikal yang berkaitan dengan pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada penanam modal.

b. Menciptakan dan meningkatkan kondusifitas daerah yang mendukung investasi.

Penciptaan dan peningkatan kondusifitas daerah yang mendukung investasi di NTT sekurang-kurangnya meliputi :

1. menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan, politik dan sosial yang mendukung pelaksanaan penanaman modal.
2. merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan implementatif tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional bidang pelayanan modal.
3. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dan perijinan bidang pelayanan modal .

4.3 Arah 2 Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi.

a. Pengembangan pangan

Pengembangan pangan merupakan upaya mewujudkan peningkatan kontribusi NTT terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan lokal, regional dan nasional serta pemanfaatan teknologi produksi, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah :

- 1) intensifikasi dan ekstensifikasi produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dikelola masyarakat guna ketersediaan pangan lokal;
- 2) mendorong percepatan investasi pendukung di bidang pangan seperti penyediaan bibit, pupuk, obat-obatan, pakan ternak dan peralatan serta pengolahan hasil pangan, guna peningkatan produksi dan distribusi komoditas pangan; dan
- 3) identifikasi dan diversifikasi produk pangan unggulan yang potensial bagi ketersediaan bahan baku industri pangan guna meningkatkan kontribusi ketahanan pangan regional dan nasional.

b. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur merupakan upaya konektivitas wilayah dan pengembangan sentra produksi, distribusi dan pemasaran, komoditas investasi unggulan, pengembangan kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur penunjang investasi lainnya. Arah kebijakan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah :

- 1) meningkatkan konektivitas lokasi sentra produksi, distribusi dan pemasaran produk unggulan investasi.
- 2) mengembangkan daerah kawasan industri, kawasan ekonomi dan kawasan pertumbuhan lainnya.
- 3) mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung investasi, khususnya di bidang pariwisata, jasa dan perdagangan pada ikon-ikon investasi unggulan di setiap sektornya.
- 4) pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga dan bandara guna mendukung kegiatan investasi baik lokal, regional, nasional dan internasional.
- 5) mendorong percepatan investasi yang berhubungan dengan pengembangan sentra produksi, distribusi, pemasaran, kawasan industri, kawasan pengembangan pariwisata dan infrastruktur jalan.

c. Pengembangan Energi.

Pengembangan energi ditujukan kepada upaya penyediaan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha melalui eksploitasi potensi energi terbarukan dan ramah lingkungan. Arah kebijakan penanaman modal melalui pengembangan energi meliputi :

- a. peningkatan pemanfaatan sumber energi lokal bagi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar daerah;
- b. pengembangan potensi energi lokal yang belum dimanfaatkan;
- c. mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di NTT; dan

- d. mendorong percepatan investasi di sektor pengadaan energi non fosil bagi ketersediaan energi di NTT.

4.4 Arah 3 Pemberdayaan UMKMK

Pemberdayaan UMKMK ditujukan pada peningkatan keterlibatan masyarakat melalui UMKMK guna meningkatkan nilai perekonomian masyarakat di bidang penanaman modal. Arah kebijakan penanaman modal dari segi pemberdayaan UMKMK antara lain :

- a. pengembangan industri rumah tangga dan kerajinan, dengan asumsi bahwa budaya masyarakat memiliki berbagai produk kerajinan yang potensial dan perlu peningkatan daya produksi misalnya pembentukan kelompok usaha dan workshop industri rumah tangga dan kerajinan;
- b. mendorong percepatan pembentukan koperasi dan usaha ekonomi masyarakat lainnya sebagai peningkatan produksi, distribusi dan pengolahan potensi ekonomi masyarakat;
- c. meningkatkan fasilitasi penyediaan modal usaha dari lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, maupun pembinaan usaha dan manajemen melalui program bapa asuh dengan investor, sebagai strategi naik kelas bagi UMKMK potensial; dan
- d. mendorong peningkatan jenis usaha dan perluasan skala usaha yang menguntungkan UMKMK potensial melalui kerjasama dan aliansi usaha guna penciptaan keterkaitan usaha UMKMK dan usaha besar.

4.5 Arah 4 Mendorong persebaran Investasi.

Mendorong persebaran investasi ditujukan pada peningkatan sentra-sentra ekonomi baru di daerah yang mendukung pengembangan investasi lokal dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari luar. Arah kebijakan penanaman modal yang mendorong persebaran investasi antara lain :

- a. optimalisasi eksplorasi dan pengelolaan peluang ekonomi strategis yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota, baik yang sudah berkembang maupun masih berupa potensi, pada

sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, termasuk pariwisata, pertambangan, jasa dan perdagangan, guna menambah jenis dan jumlah peluang usaha yang menarik bagi penanaman modal;

- b. meningkatkan kerjasama antar Kabupaten/Kota yang berdekatan guna pengembangan produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran komoditi lokal dengan mempertimbangkan ketersediaan energi, transportasi, infrastruktur dan peluang pasar lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- c. mempercepat pengembangan dan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Terpadu dan Kawasan Industri (Mbay, KI Bolok, KI Kanatang dan KI Maurole) untuk segera digunakan sebagai lokasi penanaman modal strategis, melalui penyediaan dan pembebasan lahan, penyediaan infrastruktur dan pengadaan fasilitas pendukung, termasuk ketersediaan pasokan energi.

4.6 Arah 5 Investasi berwawasan lingkungan.

Investasi berwawasan lingkungan merupakan kebijakan untuk mensinergikan pengembangan investasi dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup yang mencegah adanya kerusakan hayati akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Arah kebijakan investasi yang berwawasan lingkungan (*green-investment*) antara lain :

- a. mendorong pemanfaatan lahan kosong guna pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan dengan memperhitungkan perlindungan sumber air;
- b. menempatkan pengembangan industri pada kawasan yang sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. mengembangkan sektor prioritas dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, termasuk teknologi daur ulang dan pengolahan sampah; dan
- d. menciptakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemeliharaan lingkungan hidup, termasuk konservasi dan reboisasi kawasan hutan, perlindungan mata air dan daerah aliran sungai.

4.7 Arah 6 Promosi Investasi.

Promosi investasi ditujukan kepada upaya penyebarluasan informasi peluang investasi NTT kepada dunia usaha dalam dan luar negeri untuk menarik investor menanamkan modalnya di NTT. Arah kebijakan promosi investasi, antara lain meliputi :

- a. meningkatkan penerapan kebijakan penanaman modal Nasional dan nasional secara konsisten dan berkelanjutan guna pembentukan citra (*image-setting*) positif kepada investor tentang daerah dan peluang investasi unggulan yang dimiliki;
- b. mengembangkan pola dan strategi promosi yang lebih focus, terarah dan inovatif dengan menampilkan data peluang investasi yang nyata, akurat dan terkini beserta prospek keuntungan bagi investor dan daerah;
- c. membina koordinasi dan kerjasama dengan pelaku dan badan usaha Pemerintah dan Swasta baik nasional maupun asing dalam memperkenalkan potensi daerah dan peluang investasi daerah; dan
- d. menerapkan metode promosi yang tepat dan berkelanjutan seperti pameran dan sosialisasi, pengembangan pusat informasi investasi NTT di dalam dan luar NTT serta secara aktif berpartisipasi pada ajang-ajang promosi investasi.

4.8 Arah 7 Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif

Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif merupakan upaya peningkatan investasi melalui pemberian stimulus dan rangsangan kepada investor yang menanamkan modalnya di NTT sesuai dengan prasyarat dan ketentuan yang berlaku. Arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif, antara lain meliputi :

- a. menyiapkan ketentuan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada kebijakan investasi Nasional, berkaitan dengan persyaratan, besaran (jumlah dan kualitas) serta tatacara dan mekanisme pemberian fasilitas, kemudahan dan

insentif, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;

- b. mendorong dan memacu peningkatan investasi dan pencapaian realisasi investasi setiap investor yang menanamkan modalnya di NTT, dengan memperhatikan kemampuan setiap investor memenuhi persyaratan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif Daerah; dan
- c. membentuk tim kerja lintas sektoral yang memiliki kewenangan mengevaluasi dan menilai persyaratan pemberian, penambahan, pengurangan dan/atau pembatalan fasilitas, kemudahan dan insentif sesuai dengan realisasi investasi masing-masing penanam modal di NTT.

BAB V
PETA PANDUAN (ROADMAP)
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI NTT

Bertitiktolak dari kondisi kewilayahan, potensi dan keunggulan daerah, serta perkembangan investasi NTT sampai dengan saat ini, dengan berpatokan pada komitmen Pemerintah untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal Indonesia yang maju, maka kebijakan pengembangan investasi NTT difokuskan pada 5 (lima) sasaran strategis, yaitu :

- a. meningkatkan penguatan Instansi Penanaman Modal (IPM) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemudahan pelayanan dan perijinan investasi yang diarahkan pada penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. mengembangkan potensi investasi berbasis kerakyatan guna peningkatan ketersediaan kebutuhan rakyat yang mendukung produk unggulan investasi;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung investasi yang ditujukan pada penciptaan lapangan kerja, konektivitas wilayah bagi penyebaran investasi;
- d. meningkatkan promosi dan kerjasama investasi baik dalam maupun luar negeri bagi peningkatan investasi dan realisasi investasi di NTT; dan
- e. mengembangkan kualitas, kuantitas, kontinuitas dan diversifikasi produk unggulan daerah dalam kaitan peningkatan daya saing investasi daerah.

Sasaran-sasaran strategis kebijakan pengembangan penanaman modal NTT memiliki hubungan dan keterkaitan antara satu sasaran dengan sasaran yang lain, yang digambarkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 5.1
Diagram Hubungan Antar Sasaran Strategis



Diagram di atas menunjukkan pola hubungan antar sasaran yang berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain secara berkesinambungan, sehingga satu sasaran menjadi pangkal dan muara terhadap sasaran lainnya. Pola hubungan ini dapat dimungkinkan dari keberadaan setiap sektor investasi potensial di NTT yang saling memiliki keterkaitan dalam pengolahan, pengembangan dan pemanfaatnya, baik oleh Pemerintah dan masyarakat maupun oleh dunia usaha dan investor.

Pemerintah NTT menggunakan pola hubungan tersebut disebabkan dari kondisi setiap sektor perekonomian NTT yang berada dalam posisi rata-rata, sehingga tidak ada satu sektor pun yang lebih menonjol atau yang masih kurang dari sektor yang lainnya. Dalam keadaan ini, setiap strategi kebijakan pengembangan investasi NTT dapat diterapkan pada setiap sektor perekonomian, dengan unsur diferensiasi penerapan tiap strategi pengembangan terletak pada karakteristik dan pemanfaatan potensi investasi, serta karakteristik kewilayahan setiap Kabupaten/Kota lokasi pengembangan potensi setiap sektor perekonomian.

Selain pengembangan penanaman modal melalui sektor perekonomian, salah satu strategi yang dilaksanakan sebagai langkah awal pengembangan investasi di NTT adalah meningkatkan penguatan Instansi Penanaman Modal, kemudahan pelayanan dan perijinan investasi yang diarahkan pada penciptaan iklim

penanaman modal yang kondusif. Instansi Penanaman Modal di tingkat Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota secara efektif baru mulai dibentuk sejak akhir tahun 2010 dan masih dalam taraf konsolidasi dan pengembangannya, sehingga perannya dalam pengembangan investasi NTT belum optimal sesuai harapan, bahkan terdapat pemisahan antara Instansi Penanaman Modal dan Instansi Pelayanan Perijinan Terpadu. Berikut gambaran umum Instansi Penanaman modal di NTT.

Tabel 5.1
Instansi Penanaman modal di NTT

NO	TINGKAT	NAMA IPM
1.	Provinsi	Badan Koordinasi Penanaman Modal Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
2.	Kota Kupang	Badan Penanaman Modal Daerah
3.	Kab. Kupang	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
4.	Kab. TTS	Badan Penanaman dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
5.	Kab. TTU	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
6.	Kab. Belu	Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Terpadu Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
7.	Kab. Malaka	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
8.	Kab. Alor	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
9.	Kab. Lembata	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
10.	Kab. Flores Timur	Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
11.	Kab. Sikka	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
12.	Kab. Ende	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
13.	Kab. Nagekeo	Kantor Penanaman Modal Daerah
14.	Kab. Ngada	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
15.	Kab. Manggarai	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
16.	Kab. Manggarai Timur	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

NO	TINGKAT	NAMA IPM
17.	Kab. Manggarai Barat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
18.	Kab. Sumba Barat	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
19.	Kab. Sumba Barat Daya	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
20.	Kab. Sumba Tengah	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda
21.	Kab. Sumba Timur	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
22.	Kab. Rote Ndao	Badan Penanaman Modal Daerah
23.	Kab. Sabu Raijua	Bagian Penanaman Modal Kantor Bappeda

Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Instansi Penanaman Modal yang terpadu akan semakin memberi peluang bagi pengembangan penanaman modal di NTT melalui pemberian kemudahan pelayanan investasi maupun perencanaan dan implementasi kebijakan penanaman modal yang efektif sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan penanaman modal.

Dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan karakteristik potensi investasi, maka Pemerintah NTT menitikberatkan perencanaan pengembangan potensi dan peluang investasi NTT dalam 8 (delapan) sektor investasi, sebagai berikut:

1. **Sektor Pangan** meliputi Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
2. **Sektor Infrastruktur** meliputi infrastruktur sosial, infrastruktur perekonomian dan Infrastruktur penunjang;
3. **Sektor Energi**; meliputi ketersediaan Energi Listrik, Bahan Bakar, dan Energi Alternatif dan terbarukan lainnya;
4. **Sektor Komoditi Perdagangan** meliputi produk Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan;
5. **Sektor Kelautan** berupa budidaya perairan seperti garam, rumput laut, mutiara, perikanan dan biota laut lainnya;
6. **Sektor Pariwisata dan ekonomi berbasis budaya** meliputi bidang pengembangan kawasan wisata, perhotelan dan usaha

ekonomi berbasis seni dan budaya;

- 7. **Sektor Tambang dan Galian** meliputi pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral non logam, batuan, batuan besar termasuk marmer, gamping, batu akik, tanah liat dan lain-lain; serta
- 8. **Sektor Jasa Kreatif lainnya** meliputi bidang usaha pendukung seperti jasa perdagangan, keuangan, perbankan, transportasi, konstruksi dan jasa pelayanan.

Selanjutnya kelima sektor utama tersebut diidentifikasi berdasarkan skor ketersediaan sumber daya dan skor permintaan penggunaannya sesuai dengan karakteristik setiap Kabupaten/Kota, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Gambar 5.2
Rasio Permintaan Pasar dan ketersediaan Sumber Daya

		<i>Permintaan Pasar</i>		
		Tinggi (Skor 1)	Sedang (Skor 2)	Rendah (Skor 3)
<i>Ketersediaan Sumberdaya</i>	Melimpah (Skor 3)	A (4)	B (5)	C (6)
	Sedang (skor 2)	D (3)	E (4)	F (5)
	Minim (skor 1)	G (2)	H (3)	I (4)

Instrumen tersebut di atas menunjukkan terdapat 9 (sembilan) kelas identifikasi potensi investasi berdasarkan skor ketersediaan sumberdaya dan skor permintaan pasar (lokal/regional), yang menggambarkan 3 (tiga) alternatif aksi investasi, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Alternatif aksi I (Skor 2-3) : Kebijakan penanaman modal difokuskan pada upaya perluasan produktivitas sektor investasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan pengenalan produk kepada masyarakat guna pemenuhan kebutuhan lokal dan ketersediaan bahan mentah;
- b. Alternatif aksi II (Skor 4) : Kebijakan penanaman modal ditujukan pada upaya pengembangan dan pengolahan hasil produksi

pertama sektor investasi yang didukung dengan peningkatan produktivitas guna ketersediaan bahan mentah; dan

- c. Alternatif aksi III (Skor 5-6) : Kebijakan penanaman modal diarahkan pada upaya peningkatan nilai ekonomis produk sektor investasi melalui penggunaan IPTEK dengan didukung oleh ketersediaan bahan mentah dan pengolahannya menjadi bahan baku industri maju.

Instrumen sederhana tersebut dapat digunakan sebagai metode sederhana pengambilan alternatif kebijakan penanaman modal terhadap setiap komoditi, sektor, potensi dan peluang investasi yang ada di dasarah, sebagaimana diterapkan pada sembilan kelas identifikasi dimaksud sebagai berikut :

Tabel 5.2

Alternatif aksi identifikasi potensi penanaman modal

KLAS	IDENTIFIKASI	ALTERNATIF AKSI
A	Ketersediaan Sumber daya melimpah Permintaan Pasar tinggi	Perluasan Produksi Peningkatan pengolahan
B	Ketersediaan sumber daya melimpah Permintaan Pasar sedang	Peningkatan pengolahan Perluasan Produksi Pengembangan nilai ekonomis
C	Ketersediaan sumber daya melimpah Permintaan Pasar rendah	Pengembangan nilai ekonomis Peningkatan pengolahan Perluasan Produksi
D	Ketersediaan sumber daya sedang, Permintaan Pasar tinggi	Perluasan Produksi
KLAS	IDENTIFIKASI	ALTERNATIF AKSI
E	Ketersediaan sumberdaya sedang Permintaan Pasar sedang	Peningkatan pengolahan Perluasan Produksi
F	Ketersediaan sumberdaya sedang Permintaan Pasar rendah	Perluasan Produksi Peningkatan pengolahan Pengembangan nilai ekonomis

G	Ketersediaan Sumberdaya minim Permintaan Pasar tinggi	Perluasan Produksi
H	Ketersediaan sumberdaya minim Permintaan Pasar sedang	Perluasan Produksi
I	Ketersediaan sumberdaya minim Permintaan Pasar rendah	Perluasan Produksi Peningkatan pengolahan

Klasifikasi potensi dan sumberdaya perekonomian NTT dan alternatif aksi utama pengembangan investasi pada 8 (delapan) sektor investasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT, sesuai dengan instrumen tersebut tercantum dalam Lampiran C RUPM Provinsi NTT ini.

Berdasarkan hasil klasifikasi dan identifikasi potensi dan sumberdaya perekonomian setiap Kabupaten/Kota se- NTT tersebut dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan RUPM Nasional, maka kebijakan pengembangan Investasi di NTT dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu jangka pendek (tahap percepatan), jangka menengah (tahap pengembangan) dan jangka panjang (tahap perluasan). Masing-masing tahap memiliki prioritas utama pengembangan investasi skala tertentu, dengan memprioritaskan pengembangan lanjutan terhadap potensi investasi unggulan dan bidang usaha yang diminati atau telah dikembangkan oleh investor.

5.1 Jangka Pendek (tahap percepatan)

Merupakan tahapan percepatan investasi dalam RUPM Provinsi NTT melalui pengembangan investasi murah dan cepat (*low hanging fruits*), khususnya menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan, infrastruktur dan energi masyarakat, ketersediaan bahan mentah pengembangan sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah, termasuk pada potensi dan peluang sektor perekonomian strategis yang sudah diminati dan/atau sedang dikembangkan oleh investor.

Tahap percepatan (jangka pendek) yang memfokuskan pada penyediaan kebutuhan rakyat dan ketersediaan bahan mentah ini dilaksanakan sejak RUPM Provinsi NTT ditetapkan sampai berakhirnya RPJMD Provinsi NTT saat ini (sekarang – tahun 2018). Kebijakan investasi yang perlu diambil pada tahap ini antara lain :

- a. memperbaiki citra NTT sebagai daerah tujuan investasi potensial dengan membuka hambatan investasi dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek penanaman modal yang telah masuk (memperoleh ijin) agar dapat segera diaktualisasikan pelaksanaannya, serta yang masih menghadapi kendala yang berhubungan dengan pembebasan lahan, ketersediaan bahan baku, keterbatasan pasokan energi, keterbatasan tenaga kerja, ketersediaan prasarana pendukung dan pemasaran;
- b. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal lingkup daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik tiap daerah;
- c. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke lokasi-lokasi potensial, dalam dan luar negeri melalui kerjasama antar SKPD dan antar Kabupaten/Kota yang pro bisnis guna peningkatan nilai tambah dan daya saing potensi unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan; dan
- d. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan, termasuk penguatan kelembagaan dan aparat penanaman modal Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perumusan regulasi daerah tentang penanaman modal, termasuk pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

5.2. Tahap Pengembangan (Jangka menengah)

Tahap Pengembangan (jangka menengah) merupakan tahapan pengembangan investasi dalam RUPM Provinsi NTT melalui pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku guna

peningkatkan nilai ekonomis hasil produksi sektor-sektor investasi unggulan daerah, untuk menciptakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif produk daerah, dengan memperhatikan perluasan produktivitas berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sumberdaya guna ketersediaan bahan mentah dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan investasi NTT diarahkan pada upaya pengembangan potensi perekonomian dan peluang investasi yang dikelola oleh rakyat, berskala kecil dan yang masih bersifat lokal seperti UMKM, serta menarik minat investor melalui pemasaran, penyediaan modal, pola bapak asuh serta kerjasama usaha dan penggabungan usaha.

Tahap pengembangan (jangka menengah) ini mengarahkan investasi pada pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku dengan peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi sumberdaya, dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama RPJMD Provinsi NTT berikutnya (2018–2023). Kebijakan investasi yang perlu diambil pada tahap ini antara lain :

1. Pemetaan lokasi pengembangan, baik yang merupakan kluster produksi, kluster pengolahan maupun yang merupakan kluster pemasaran, beserta infrastruktur dan sumber energi penunjang di seluruh wilayah NTT;
2. Pengembangan kawasan strategi pengembangan investasi antar Kabupaten/Kota dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama yang intensif antar Daerah pemasok, pengolah dan pemasaran yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber energi yang memadai;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*), kreatif dan inovatif sebagai motor penggerak alih teknologi dan pencipta terobosan dalam pengelolaan bahan mentah menjadi bahan baku industri besar/maju;
4. Promosi investasi yang mengarah pada penyaluran dan penggunaan bahan baku hasil pengolahan bahan mentah oleh pelaku usaha daerah;

5. Pemeliharaan kawasan produksi dasar guna kesinambungan ketersediaan bahan mentah melalui reboisasi dan revitalisasi lahan/kawasan.

5.3. Tahap Perluasan (Jangka panjang)

Pada tahapan ini, penanaman modal di NTT telah memasuki tahapan industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tahapan ini didasari oleh kenyataan bahwa berbagai sumberdaya yang dimiliki bersifat terbatas dan bahkan mungkin pada masa yang akan datang sumber daya alam sudah sangat minim, sehingga diperlukan berbagai terobosan dan inovasi baru untuk mampu menyikapinya dengan menemukan solusi dan produk sebagai alternatif pengganti sumber daya alam yang terbatas.

Pada tahapan ini, kegiatan penanaman modal tidak hanya difokuskan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi lebih menekankan adanya kegiatan investasi berskala luas yang mampu menjadi motor penggerak industri maju yang berpengetahuan, inovatif dan mampu menciptakan penemuan-penemuan baru dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang. Hal ini dimaksudkan agar ke depan daerah dan masyarakat NTT tidak lagi menjadi penonton dan tertinggal dalam arus kemajuan jaman, tetapi mampu mengambil peran sebagai pemeran utama dalam pentas IPTEK nasional dan internasional.

Tahap perluasan ini menitikberatkan pada investasi yang bahan baku menjadi bahan jadi yang bernilai ekonomis lebih tinggi dengan menggunakan Teknologi maju dilaksanakan sampai tahun 2025 atau sampai ditetapkan RUPM selanjutnya, baik RUPM maupun RUPM Provinsi NTT. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan dalam fase ini adalah :

- a. mempersiapkan regulasi daerah yang mendukung dan mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and developement*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi;

- b. menjadikan NTT sebagai kawasan investasi ramah lingkungan; dan
- c. meningkatkan penyediaan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (Industrial-Technology Park/TECHNOPARK), yang sinergis antara Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Litbang dan Industri.

BAB VI

PELAKSANAAN

6.1. Target Investasi NTT

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi NTT merupakan suatu perencanaan jangka panjang di bidang penanaman modal yang disusun berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, menegaskan Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan Prioritas Pengembangan Potensi Provinsi. RUPM Provinsi NTT berisikan mengenai kebijakan-kebijakan dasar dan arah strategis kegiatan penanaman modal di Provinsi NTT yang dirumuskan secara komprehensif meliputi kebutuhan makro investasi daerah, arah perbaikan iklim usaha, perbaikan fasilitasi dan penguatan promosi penanaman modal, pembangunan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta hubungan antara lembaga-lembaga terkait di bidang penanaman modal baik di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Untuk pencapaian implementasi kebijakan dasar dan arah strategis penanaman modal itu perlu dirumuskan suatu target pencapaian investasi setiap tahun, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan kegiatan penanaman modal, sesuai dengan persentase realiasi investasi setiap tahunnya. Target dan realiasi pelaksanaan penanaman modal di Provinsi NTT lima tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 6.1
Target dan Realiasi Investasi Provinsi NTT
Tahun 2011 - 2015

Tahun	Target Investasi (Ribu Rupiah)	Realisasi		Keterangan
		Jumlah (Ribu Rupiah)	Persentase (%)	
2011	1.200.000.000.000	748.684.707.500	62,39	Dari Sektor PMA & PMDN Mata uang asing diproeksi ke dalam rupiah
2012	1.420.000.000.000	26.940.539.279	1,9	
2013	1.904.000.000.000	2.020.194.497.440	106,1	
2014	1.500.000.000.000	2.869.530.000.000	191,3	
2015	2.000.000.000.000	3.031.359.165.768	151,57	
Total	8.024.000.000.000	8.696.708.909.987	108,38	
Rata- Rata	1.604.800.000.000	1.739.341.781.997	108,38	

Sumber data : BKPM Provinsi NTT Tahun 2015

Dari tabel tersebut diketahui bahwa total target investasi Provinsi NTT selama lima tahun terakhir sebesar 8,024 trilyun rupiah dengan rata-rata per tahun sebesar 1,604 trilyun rupiah sedangkan total realisasi investasi NTT dalam waktu tersebut sebesar 8,696 trilyun rupiah atau melampaui target investasi sebesar 108,38%, dengan rata-rata realiasi investasi per tahun sebesar Rp. 1,739 trilyun (8,38%) dari rata-rata target investasi tahunan Provinsi NTT.

Dari target dan realisasi penanaman modal di Provinsi NTT selama lima tahun terakhir ini maka ditetapkan proyeksi pencapaian kegiatan penanaman modal Provinsi NTT, melalui proyeksi target investasi tahunan selama jangka waktu pelaksanaan RUPM Provinsi NTT yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 6.2
Proyeksi Target Capaian Investasi Provinsi NTT
Tahun 2016 – 2025

Tahun	Target Investasi (Ribu Rupiah)	Peningkatan		Ket.
		Jumlah	%	
2016	2.200.000.000	385.000.000	17,50%	Dari Sektor PMA & PMDN Mata uang asing diproeksi ke dalam rupiah
2017	2.420.000.000	452.375.000	17,50%	
2018	2.662.000.000	531.540.625	17,50%	
2019	2.928.000.000	624.560.234	17,50%	
2020	3.221.000.000	733.858.275	17,50%	
2011	3.543.000.000	862.283.474	17,50%	
2012	3.897.000.000	1.013.183.081	17,50%	
2013	4.287.000.000	1.190.490.121	17,50%	
2014	4.716.000.000	1.398.825.892	17,50%	
2015	5.188.000.000	1.643.620.423	17,50%	
Total	35.062.000.000	8.835.737.125		
Rata- Rata	3.506.200.000	883.573.713		

Sumber data : BKPM Provinsi NTT Tahun 2015

Dalam tabel di atas diketahui bahwa proyeksi target investasi tahun 2016 didasarkan pada target tahun 2015 yang kemudian dengan mempertimbangan kondisi sosial budaya dan perkembangan perekonomian Provinsi NTT, maka target tersebut diproyeksikan meningkat 17,5% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025, sehingga total proyeksi target investasi selama berlakunya RUPM Provinsi NTT (2015-2025) sebesar 35,062 trilyun rupiah dengan rata-rata per tahun sebesar 3,506 trilyun rupiah.

6.2. Pengembangan Potensi Investasi

Berdasarkan RUPM Nasional, tiga bidang pokok juga akan menjadi fokus pengembangan yaitu bidang Pangan, Energi dan Infrastruktur mengingat tiga bidang tersebut merupakan pilar pengembangan perekonomian di masa datang. Tujuan penyusunan RUPM adalah sebagai panduan dan arah bagi setiap pengambil keputusan yang berkaitan dengan aktivitas penanaman modal baik di Pemerintah Pusat, maupun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk instansi/ sektor terkait.

Dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan karakteristik potensi investasi, maka Pemerintah NTT menitikberatkan perencanaan pengembangan potensi dan peluang investasi NTT dalam 8 (delapan) sektor investasi, yakni sektor pangan, sektor infrastruktur, sektor energi, sektor komoditi perdagangan, sektor kelautan, sektor pariwisata, sektor tambang dan galian, serta sektor jasa kreatif lainnya.

Dalam rangka pengembangannya untuk meningkatkan investasi daerah NTT, pengelolaan kedelapan sektor investasi diarahkan pada 3 (tiga) aspek pengembangan investasi, yaitu:

a. Pengembangan investasi budidaya

Pengembangan investasi budidaya diarahkan kepada investasi yang bergerak di bidang pengadaan dan peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah yang sudah ada maupun belum ada di NTT namun potensial untuk dikembangkan, meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya. Pengembangan investasi budidaya difokuskan pada daerah sentra produksi dan daerah potensial pengembangan produksi.

b. Pengembangan investasi pengolahan

Pengembangan investasi pengolahan diarahkan kepada investasi yang bergerak di bidang industri pengolahan dan peningkatan nilai ekonomis komoditi-komoditi unggulan daerah yang dimiliki, telah melebihi kebutuhan pasar lokal. Pengembangan investasi pengolahan difokuskan pada daerah yang berdekatan dengan sentra produksi dan memiliki akses pasar dan distribusi.

c. Pengembangan investasi penunjang

Pengembangan investasi penunjang diarahkan kepada investasi yang bergerak di bidang industri penunjang produksi komoditi daerah dan industri pemenuhan kebutuhan lokal yang masih memerlukan pasokan bahan baku dari luar daerah. Pengembangan investasi budidaya difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan-kawasan pengembangan terpadu yang memiliki akses transportasi dan distribusi.

Ketiga aspek pengembangan investasi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan penerapannya sesuai dengan kondisi setiap komoditi ekonomi unggulan yang dimiliki setiap daerah. Untuk pelaksanaannya aspek-aspek pengembangan investasi dimaksud maka wilayah NTT dibagi dalam 5 (lima) daerah investasi.

Daerah-daerah investasi ini yang memiliki karakteristik masing-masing, yang didasarkan pada kondisi geografis, demografis dan kondisi sosial ekonomis provinsi NTT serta dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan masyarakat serta untuk membuka isolasi kewilayahan. Kelima daerah investasi NTT adalah :

a. Daerah Investasi Sumba

Daerah Sumba meliputi kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur (4 Kab) dengan karakteristik satu daratan, kontur tanah sabana, ekonomi utama peternakan. Kawasan pengembangan terpadu di daerah investasi Sumba adalah Kawasan Industri Kanatang. Pintu penghubung utama adalah Waingapu dan Weetabula.

b. Daerah Investasi Flores I

Daerah Investasi Flores I meliputi kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo (5 Kab) dengan karakteristik daratan dan kepulauan, kontur tanah pegunungan subur, ekonomi utama pertanian dan perkebunan. Kawasan pengembangan terpadu di daerah investasi Flores I adalah Mbay. Pintu penghubung utama adalah Labuan Bajo dan Mbay.

c. Daerah Investasi Flores II

Daerah Investasi Flores II meliputi Kabupaten Ende, Sikka, Flores Timur dan Lembata (4 Kab) dengan karakteristik daratan dan kepulauan, kontur tanah pegunungan kurang subur, ekonomi utama kelautan dan perkebunan. Kawasan pengembangan terpadu di daerah investasi Flores II adalah Kawasan Industri Maurole. Pintu penghubung utama adalah Ende dan Maumere.

d. Daerah Investasi Timor I

Daerah Investasi Timor I meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndao dan TTS (5 Kab/Kota) dengan karakteristik daratan dan kepulauan, kontur tanah dataran tinggi kurang subur, ekonomi utama peternakan dan perikanan; Kawasan pengembangan terpadu di daerah investasi Timor I adalah Kawasan Industri Bolok. Pintu penghubung utama adalah Kota Kupang.

e. Daerah Investasi Timor II

Daerah Investasi Timor II meliputi Kabupaten Alor, TTU, Belu dan Malaka (4 Kab) dengan karakteristik daratan dan kepulauan, kontur tanah pegunungan kurang subur, ekonomi utama peternakan dan pertanian. Kawasan pengembangan terpadu di daerah investasi Timor II adalah Kawasan Industri Wini. Pintu penghubung utama adalah Atapupu dan Kalabahi.

Dalam rangka pengembangan potensi daerah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota menyiapkan peta investasi provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif termasuk penyiapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya. Daerah Investasi NTT dan kondisi komoditi unggulan daerah yang menjadi prioritas pengembangan investasi di setiap Kabupaten/Kota dan dapat dilihat dalam lampiran RUPM Provinsi NTT.

6.3. Fasilitasi Proyek Investasi Strategis

Sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal, atau mesin peralatan produksi dalam negeri serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas, maka perlu disusun skema insentif dan fasilitas investasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian Provinsi NTT di masa datang.


Prinsip dasar pemberian insentif dan fasilitas kepada para penanam modal mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan keuangan Daerah serta harus promotif dibandingkan dengan fasilitas daerah lain, sehingga menarik minat para investor baik di bidang PMA maupun PMDN untuk menanamkan modalnya di NTT. Untuk itu, secara garis besar Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan rencana pemberian insentif dan fasilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai berikut :

1. Fasilitas penanaman modal dapat diberikan kepada penanaman modal yang melakukan perluasan usaha; atau melakukan penanaman modal baru.
2. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa:
 - a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
 - b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
 - e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
 - f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
3. Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2007, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh:
 - a. Hak atas tanah;

- 1) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 2) Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - 3) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- b. Fasilitas pelayanan keimigrasian berupa:
- 1) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
 - 2) Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - 3) Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
 - 4) Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
 - 5) Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
- c. Fasilitas perizinan impor.

Selain itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT dapat memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi investor PMDN dalam daerah yang berinvestasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah, berupa :

- a. Fasilitasi/rekomendasi pengurusan perijinan penanaman modal;
- b. Fasilitasi/rekomendasi pengurusan penyediaan dan pembebasan lahan;
- c. Fasilitasi/rekomendasi pengurusan kredit usaha dari perbankan;
- d. Penggunaan alat berat/fasilitas milik Daerah bila memungkinkan.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN A : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 Februari 2016

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014**

No	Sub Urusan	Pemerintah Provinsi	Daerah/Kab/Kota
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	a. penetapan pemberian fasilitas/menitikberatkan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; dan b. pembuatan peta potensi investasi provinsi.	a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan b. pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu: a. penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan b. penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah Provinsi	Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota.
4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

No	Sub Urusan	Pemerintah Provinsi	Daerah/Kab/Kota
5.	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi.	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN B : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 Februari 2016

**ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018, isu strategis dirumuskan dengan melihat fakta atau kondisi yang menggambarkan potensi dan permasalahan.

**A. Isu Strategis 1: Peningkatan dan Perluasan
Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas**

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Pendidikan sebagai media peningkatan sumber daya manusia harus benar-benar memberikan ruang pembelajaran dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan antara lain ketersediaan, sebaran, mutu sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai (akses pendidikan dan partisipasi masyarakat masih terbatas), kualifikasi dan kompetensi guru yang belum memenuhi kriteria, serta sebarannya yang belum merata. Sementara itu, manajemen pendidikan pun belum memenuhi tolok ukur SPM. Hal ini menimbulkan rangkaian akibat, seperti sistem dan proses pembelajaran yang masih jauh dari standar yang ditetapkan yang berimbas pada masih rendahnya tingkat dan mutu kelulusan serta relevansi kompetensi lulusan. Sedangkan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dihadapkan pada kondisi belum maksimalnya pembibitan dan pembinaan atlet berbakat serta pengembangan cabang olahraga potensial dan seni budaya.

B. Isu Strategis 2: Penguatan Sistem Kesehatan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Yang Universal, Efisien, Berkualitas Dan Berkelanjutan

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan bersama antara Pemerintah dengan semua pemangku kepentingan masih dihadapkan pada kondisi seperti terbatasnya jumlah tenaga kesehatan baik dari aspek kuantitas, kualitas dan persebarannya. Sedangkan dari aspek fasilitas kesehatan belum semua Puskesmas belum memiliki fasilitas standar PONED (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan belum semua Rumah Sakit belum memiliki fasilitas standar PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). Aspek partisipasi masyarakat juga perlu mendapat perhatian serius karena Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) belum berfungsi secara maksimal. Selain aspek-aspek tersebut diatas penataan manajemen mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di Puskesmas dan Rumah Sakit turut menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian khusus.

C. Isu Strategis 3: Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dihadapkan pada kondisi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, Sebagian besar sebagai Pekerja Keluarga Tanpa Upah, tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan, maraknya kasus perdagangan perempuan, kurangnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita asal NTT di luar negeri, terbatasnya ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta belum terpenuhinya kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif. Sedangkan upaya pemenuhan Hak anak dihadapkan pada kondisi rendahnya partisipasi anak dalam proses pembangunan, masih banyaknya anak jalanan, bayi dan anak terlantar, anak nakal, penyandang cacat, belum maksimalnya sistem perlindungan anak, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak serta perdagangan anak.

Selain isu di atas salah satu isu strategi yang Harus menjadi prioritas adalah isu pekerja migran. Permasalahan pekerja migran kita adalah dalam pelayanan, penempatan dan perlindungan. Selain ketiga masalah di atas rendahnya pendidikan dan ketrampilan juga menjadi penyebab kecendrungan terjadinya unsur eksploitasi dan sindikasi pada proses rekrutmen yang membuat pekerja migran tidak berdaya. Perlindungan terhadap pekerja migran yang didominasi oleh pekerja migran perempuan perlu mendapatkan perhatian yang utama dan serius karena sangat rentan terhadap, trafficking eksploitasi, kekerasan fisik dan pelecehan seksual.

D. Isu Strategis 4: Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas

Laju pertumbuhan masih lebih rendah dari nasional. Rata-rata laju pertumbuhan per tahun selama 2009-2012 di atas 6, sementara NTT rata-rata di bawah 6%. Akselerasi pertumbuhan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran lebih cepat lagi. Pendorong utama pertumbuhan daerah adalah konsumsi, sedangkan sumbangan investasi (PMTB) masih rendah. Selain itu, NTT selalu mengalami defisit perdagangan antardaerah dalam periode 2009-2011.

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi wilayah NTT yang memiliki banyak potensi SDA untuk dikembangkan, terutama pada sektor pertanian (perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan), pariwisata (Wisata Budaya dan Alam termasuk laut dan daratan). Sampai dengan saat ini potensi yang diminati oleh investor luar negeri adalah potensi pariwisata (perhotelan dan jasa wisata) sedangkan investor dalam negeri lebih pada sektor perdagangan dan jasa (transportasi dan jasa). Adapun sektor primer kurang diminati oleh investor luar dan dalam negeri. Hal ini lebih dikarenakan sarana prasarana pendukung seperti ketenagakerjaan, transportasi, kondisi keamanan dan stabilitas politik daerah serta regulasi masih dirasa kurang mendukung.

Perhatian pemerintah NTT dalam penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran pedesaan masih dinilai belum cukup signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja berjalan tidak seimbang dan lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan. Hal ini disebabkan lokasi pusat ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga berdampak pula pada upaya pengurangan tingkat kemiskinan yang lebih banyak berada di pedesaan. Sektor ekonomi masih digerakkan oleh nilai konsumsi sehingga dibutuhkan fundamental ekonomi yang baik yaitu dari sektor produksi.

Upaya peningkatan kualitas pembangunan ekonomi daerah juga dilakukan melalui penguatan basis ekonomi daerah dengan mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi yang mempunyai basis pengusahaan yang luas di tengah masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya Perikanan, Keluatan serta Pariwisata (Bahari), guna mewujudkan ciri pembangunan ekonomi biru (*Blue economy*) sebagai daya saing ekonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. Isu Strategis 5: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi pengembangan yang sangat besar berbasis sumber daya alam terutama pada sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan. Pengembangan pada sub sektor pertanian telah menghasilkan produk unggulan seperti jagung, kakao, jambu mete. Begitu pula pada sub sektor peternakan telah menghasilkan produk unggulan seperti ternak sapi dan babi yang sangat berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja. Namun dalam pengembangannya, peningkatan komoditas unggulan ini masih belum optimal karena masih belum didukung dengan ketersediaan prasarana produksi (industri), pasar dan tenaga kerja yang trampil.

Peningkatan produksi sektor tersebut (pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan) juga didorong untuk tujuan ketahanan pangan pedesaan dan pemenuhan gizi keluarga dengan menerapkan sistem produksi berwawasan spesifik lokal serta memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim.

Khusus untuk perikanan dan kelautan perlu mendapatkan perhatian yang lebih optimal. Sektor unggulan di Provinsi NTT masih merupakan sektor primer. Selain itu, peran sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan wilayah juga masih rendah. Secara keseluruhan kontribusi sektor unggulan dalam pertumbuhan wilayah baru 28%. Intensitas perdagangan yang signifikan baru terjadi dengan wilayah Jawa-Bali, sedangkan dengan pulau-pulau lain relatif kecil.

F. Isu Strategis 6: Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau

Provinsi NTT termasuk salah satu dari delapan Provinsi berciri kepulauan, terdiri dari 1.192 pulau (946 belum bernama) dengan kualitas konektivitas wilayah yang belum memadai. Masalah dalam konektivitas adalah transportasi publik yang masih lemah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, daya saing lemah, penanggulangan kemiskinan relatif lambat.

Permasalahan transportasi publik lainnya yang perlu diketahui adalah kurangnya jumlah sarana atau kapasitas pelayanan, jumlah pelayanan dan jaringan pelayanan terbatas, biaya operasional terlalu tinggi, jumlah transfer antar intra moda tinggi, keuntungan rendah, kualitas sarana dan prasarana dan keselamatan yang rendah.

Sarana dan prasarana dasar belum mendukung pelaksanaan pembangunan baik dari tingkat pelayanan, sisi pemerataan pembangunan maupun dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Prasarana jalan di Nusa Tenggara Timur dalam sepuluh tahun terakhir hampir tidak mengalami perkembangan, baik panjang jalan maupun kualitas atau kelasnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah masih banyaknya desa-desa yang letaknya terisolir, hubungan antar

sentral produksi dengan pasar masih tertutup. Kondisi jalan banyak mengalami kerusakan baik rusak berat maupun rusak ringan. Keadaan ini tidak hanya pada jalan Provinsi, tetapi juga jalan Nasional. Kondisi infrastruktur jalan ini berimplikasi pada tingginya biaya transaksi dan transportasi yang mengakibatkan daya saing komoditi dari NTT ke pasar regional maupun ekspor menjadi rendah. Selain itu ketersediaan armada transportasi antar pulau terutama laut dan udara juga terbatas dan tidak menjamin faktor keamanan karena kualitas armada transportasi kurang optimal, sehingga berimplikasi kepada penurunan investasi dari luar dan dalam negeri.

G. Isu Strategis 7: Rendahnya Kinerja Birokrasi dan Minimnya Pelayanan Publik

Belum terasanya dampak politik otonomi daerah bagi masyarakat, oleh karena keterbatasan sumber daya dan kurang kesiapan Pemerintah, berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kepentingan bukan berdasarkan kompetensi/keahlian; (2) Belum optimalnya pengisian jabatan sesuai profesionalisme PNS; (3) Keenganan masyarakat untuk mengontrol dan memberi masukan ke Pemerintah akibat absennya peraturan Hukum yang memberi perlindungan kepada mereka; (4) Belum terselenggaranya restrukturisasi dan perampingan kelembagaan birokrasi Pemerintah yang hemat struktur dan kaya fungsi;

Belum terasanya dampak positif Otonomi Daerah bagi masyarakat oleh karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya persiapan pemerintah dalam pelaksanaannya yang berakibat pada : (1) Kebijakan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum berdasarkan kompetensi/keahlian *The Right man and the right places* sehingga menimbulkan efek negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) krisis sumber daya manusia di dalam pengisian jabatan yang diatasi dengan pengontrolan kepangkatan seseorang karena belum terpenuhinya persyaratan jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan miskinnya profesionalisme PNS mengakibatkan pelayanan publik menjadi lamban dan pilih kasih; (3) Keengganan masyarakat untuk mengontrol dan memberikan

masuk ke pemerintah akibat absennya peraturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap mereka; (4) Belum terselenggaranya restrukturisasi dan perampingan kelembagaan birokrasi pemerintahan hemat struktur dan kaya fungsi (*Right Sizing*); (5) Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dengan ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat masih besar (presentase PAD terhadap APBD Hanya 4-6% saja), (6) belum optimalnya penegakan HaM dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan.

H. Isu Strategis 8: Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim

Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting bagi wilayah kepulauan yang perekonomiannya sangat bergantung pada produksi komoditas primer. Dampak perubahan iklim akan dirasakan paling besar di wilayah kepulauan, khususnya pulau-pulau kecil. Rehabilitasi lingkungan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan akan meningkatkan daya tahan lingkungan. Di samping itu pembangunan di NTT juga diupayakan untuk pengurangan tingkat pemanasan global, efek rumah kaca serta peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi SDA melalui penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan terjadinya banjir dan erosi. Kemudian dalam bidang pertambangan seperti pertambangan marmer di Kabupaten TTU dan TTS yang dilakukan oleh investor tidak memperhatikan aspek lingkungan, karena potensi tambang marmer berada di kawasan konservasi Mutis Timau, dimana kedua kawasan tersebut adalah wilayah penghasil persediaan air di pulau Timor.

Ancaman terhadap kerusakan ekosistem laut masih juga terjadi yang berakibat pada penurunan produksi ikan dan kerusakan terumbu karang seperti pemboman ikan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat di daerah pesisir pantai. Pengembangan potensi sumberdaya alam daratan dan lautan seperti ; (a) hutan lindung Mutis dan Timau; (b) Taman

Nasional Kelimutu; (c) Pulau Komodo; (d) Taman Laut di Maumere, (e) Labuan bajo untuk pengembangan pariwisata serta pengembangan ternak merupakan prioritas pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun pengelolaan sumber daya alam untuk menunjang pariwisata dan peningkatan pendapatan masyarakat kurang didukung dengan prasarana pendukung dasar yang memadai, seperti Jalan, sarana transportasi dan penginapan.

Sementara itu, sektor peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan tidak didukung dengan cara-cara baru (inovasi teknologi) dalam sistem produksi, pengolahan Hasil, sistem pemasaran dan dukungan SDM yang memadai. Inovasi yang terintegrasi dengan kebutuhan infrastruktur dan layanan di tingkat pedesaan, kabupaten dan Provinsi serta memperhatikan perubahan-perubahan lingkungan biofisik, iklim dan kebijakan nasional dan global yang terjadi.

I. Isu Strategis 9: Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kawasan Khusus

Kawasan perbatasan di NTT baik itu perbatasan laut maupun darat, dengan Provinsi lain yaitu Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Manggarai Barat serta kawasan perbatasan antar negara di 12 (dua belas) kabupaten meliputi kawasan perbatasan di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Rote Ndao, Sabu Raijua, Alor, Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah serta Kabupaten Sumba Barat Daya. Semakin meningkatnya pelintas batas illegal dan rendahnya perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan merupakan permasalahan tersendiri bagi Provinsi NTT di samping permasalahan-permasalahan yang kompleks lainnya. Selain itu juga permasalahan perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota membutuhkan penanganan tersendiri dengan melibatkan semua unsur baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan tokoh masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan masih rendah disamping sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal ini yang mendorong belum berkembangnya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut sehingga perekonomian wilayah masih cenderung tertinggal. Sementara


perekonomian wilayah masih cenderung tertinggal. Sementara itu, dalam konteks kawasan khusus, penguatan manajemen KAPET Mbay dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masih belum optimal dikarenakan masih belum berkembangnya keterpaduan program antara sektor dan antara wilayah (kabupaten, Provinsi) serta antar pelaku usaha domestik maupun internasional. Hal lain yang terkait erat dengan masalah perbatasan adalah penanganan masalah warga *ex Timor Timur* serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang belum dilakukan secara menyeluruh. Di samping itu, masih kurangnya kestabilan keamanan dan penegakan hukum menyebabkan masih sering terjadinya konflik di daerah perbatasan.

J. Isu Strategis 10 : Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan rawan bencana alam, baik itu bencana alam geologi berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi maupun bencana akibat perubahan iklim seperti banjir, angin topan, kekeringan, longsor dan gelombang pasang. Disamping itu juga rentan terhadap bencana yang diakibatkan oleh kegiatan manusia seperti kebakaran karena pembakaran hutan dan ladang.

K. Isu Strategis 11: Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain dari itu masih banyak penduduk Nusa Tenggara Timur yang menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak jalanan, anak terlantar, Komunitas Adat Terpencil (KAT), wanita rawan sosial ekonomi, pekerja anak dan penyandang cacat serta belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat.

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN C : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 13 TAHUN 2016
 TANGGAL : 10 Februari 2016

FORMAT PETA PANJUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

VISI : Terwujudnya NTT sebagai tujuan investasi yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian daerah

- MISI :
 a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanaman Modal.
 b. Mengembangkan potensi investasi.
 c. Meningkatkan investasi dan realisasi investasi.
 d. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri.

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL				
NO	JANGKA PENDEK (2016 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2018 - 2023)	JANGKA PANJANG (2023 - 2025)	
1	2	3	4	5
A.	BIDANG PANGAN	Peningkatan produksi pangan di sentra-sentra produksi guna pemenuhan kebutuhan pangan lokal setiap kawasan pengembangan.	Mendorong pertumbuhan industri pengolahan berbahan dasar pangan guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan pasar regional.	Mempercepat penggunaan IRTK bidang pangan dalam industri pangan lanjutan guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan pasar nasional dan ekspor.
B.	BIDANG INFRASTRUKTUR	Percapatan infrastruktur sosial dan ekonomi yang dibutuhkan dalam peningkatan produksi di setiap kawasan pengembangan.	Pengadaan infrastruktur yang menunjang distribusi dan pemasaran produk guna pemenuhan kebutuhan lokal dan pasar.	Pengadaan infrastruktur penunjang dan pendukung pengembangan industri guna percepatan realisasi investasi

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2016 - 2018)			JANGKA MENENGAH (2018 -2023)		JANGKA PANJANG (2023 -2025)	
		1	2	3	4	5		
C.	BIDANG ENERGI	Peningkatan kapasitas dan ketersediaan energi di setiap kawasan pengembangan guna pemenuhan kebutuhan energi lokal.			Perluasan jaringan dan kemudahan penyuluran energi di sentra-sentra produksi guna mendukung peningkatan produksi.		Pengembangan sumber energi alternatif non fosil guna pemenuhan kebutuhan dunia usaha dalam pengembangan industri maju.	
D.	BUDIDAYA PERAIRAN	Percepatan realisasi investasi di bidang pengolahan sumberdaya potensial perairan yang didukung dengan peningkatan produksi perairan.			Penyiapan pemetaan dan Promosi investasi khusus di bidang eksplorasi, budidaya dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perairan darat.		Pengembangan industri pengolahan yang menggunakan bahan dasar/bahan mentah hasil produksi sumber daya perairan.	
E.	KOMODITI PERDAGANGAN	Peningkatan produktivitas sentra komoditi perdagangan potensial di tiap kawasan pengembangan.			Pemetaan dan pengembangan komoditi perdagangan khususnya pada lahan-potensial yang mendukung konservasi lingkungan.		Pengembangan investasi di bidang pengolahan komoditi daerah guna peningkatan nilai ekonomis dan daya saing komoditi di pasar nasional dan ekspor.	
F.	TAMBAH IDAN GALIAN	Pengkajian dan pemetaan sumberdaya pertambangan dan galian di tiap kawasan pengembangan guna perencanaan investasi.			Pengembangan investasi di bidang pertambangan dan galian dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.		Pengembangan investasi di bidang pertambangan dan galian guna peningkatan nilai ekonomis dari daya saing komoditi di pasar nasional dan ekspor.	

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK (2016 - 2018)			JANGKA MENENGAH (2018 -2023)		JANGKA PANJANG (2023 -2025)	
		1	2	3	4	5		
G.	USAHA EKONOMI KREATIF	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi kreatif berbasis seni, budaya dan pengolahan yang menunjang sektor pariwisata, perdagangan dan jasa lainnya.			Peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha ekonomi kreatif melalui peningkatan modalan dan pendampingan peningkatan nilai ekonomis produk.		Peningkatan kontinuitas dan daya saing produk usaha ekonomi kreatif guna peningkatan nilai ekonomis dan pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan ekspor.	
H	PARIWISATA (PERHOTELAN dan kawasan wisata)	Pengenalan dan pembinaan sadar wisata dan pembukaan lokasi wisata yang belum dikelola.						
I.	JASA-JASA LAIN	Percepatan investasi bidang jasa pelayanan di tiap kawasan pengembangan guna pemenuhan kebutuhan lokal.			Pengembangan investasi jasa produksi yang menunjang peningkatan produktivitas sentra-sentra perekonomian.		Pengembangan investasi bidang jasa peningkatan berbasis IPTEK guna pengolahan dan peningkatan nilai ekonomis produk dan pemenuhan kebutuhan pasar.	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

NO	PROYEK INVESTASI	Nilai Investasi	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4	5	6
5	NAMA PERUSAHAAN : PT. Cheetham Flores Indonesia -Jenis proyek : KELAUTAN -Lokasi : Mbay2 kecamatan Aesesa Kabupaten Nageko -Status : PMA -Bidang usaha : Ekstraksi Garam -Produksi : -Lahan : -Tenaga kerja : -Rencana produksi komersia : -Kontak poin : 0361-29022063/29022040	314.375.000.000	No. PPM/Tgl : No.2179/11P/PPMA/2014 Tgl 07 Agustus 2014	Masih terbambatnya realisasi pelaksanaan investasi dari target yang ditentukan	Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan
6	NAMA PERUSAHAAN : PT. Grand Nusantara -Jenis proyek : Eksplorasi emas -Lokasi : Batu Gosok Kab. Manggarai Barat -Status : PMA -Bidang usaha : Pertambangan -Produksi : -Lahan : -Tenaga kerja : 31 -Rencana produksi komersia : -Kontak poin : 021-23585718	80.000.000.000	No. Ijin : 1/1/PPM/V/PPMA/2011, Tgl 17-6-2011 SIUP - Besar : No. 02121/1.824.271 Tgl 29-6-2009	Sda	Sda
7	NAMA PERUSAHAAN : PT. Pancuran Intan Makmur -Jenis proyek : KONSTRUKSI -Lokasi : Kecamatan Komodo Manggarai Barat -Status : PMA -Bidang usaha : Konstruksi Gedung -Produksi : -Lahan : -Tenaga kerja : -Rencana produksi komersia : -Kontak poin : 021-5468888/5475615	78.000.000.000	No. Ijin : 1/1/PPM/V/PPMA/2011, Tgl 17-6-2011 SIUP - Besar : No. 02121/1.824.271 Tgl 29-6-2009	Sda	Sda
8	NAMA PERUSAHAAN : PT. AUSTRALASIA BIOFUEL -Jenis proyek : PERKEBUNAN -Lokasi : Kec. Mambo Kab. Sumba Tengah -Status : PMA -Bidang usaha : Pengembangan Jarak Pagar (Jatropha) -Produksi : -Lahan : -Tenaga kerja : 21 ORG -Rencana produksi komersia : -Kontak poin : 082147161718	18.680.000.000	No. PPM/Tgl : 00071/1/PPM/PPMA/2010 Tgl.26-1-2010 Ijin Lokasi : No.KEP/HK/128/2010 Tgl. 22 Mei 2010 UU : No.112/500.53.17/2010 Tgl. 22-6-2010 Gangguan/HO	Sda	Sda

NO	PROYEK INVESTASI	Nilai Investasi	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4	5	6
9	NAMA PERUSAHAAN : PT. MURNI MULTI REJEKI Jenis proyek : PARIWISATA Lokasi : Batu Gosok, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat Status : PMDN Bidang usaha : Jasa akomodasi (Cottage), rekreasi dan hiburan Produksi : Lahan : 20 HA Tenaga kerja : 21 ORG Rencana produksi komersia : Kontak poin : Fax. 0385-41030	14.500.000.000	No. SP Tgl : 03/53/PI/PI/PMDN/2012 Tgl.30 Juli 2012 SITU : No.EK.503/173/XI/2007 Tgl.4-9-2007 Sertifikat tanah : No.552/63/08/MGR/1994 IMB : No.HK.04.02.01/II/585/CK-98 AMDAL : DKPLH.660.1/391/XI/2005 Tgl.19-9-2005 SUP : No.503.510/KPPT/24IV/2010 (20-4-2010) IMB : No.HK.04.03.01/II/585/CK-98 Ijin Gangguan/HO : KPPT.503.660/61/XI/2010 IMB : No.552/63/08/MGR/1994 Tgl.21-3-1994	- Belum tersedianya air bersih - Akses jalan raya listrik	Adanya upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur penunjang sesuai kemampuan daerah
10	NAMA PERUSAHAAN : PT. Gunung Sirung Alor Mining Jenis proyek : Pertambangan timah Lokasi : Wakapsir, Kec. Alor Barat Daya Kab. Alor Status : PMA Bidang usaha : Pertambangan timah Produksi : Lahan : 5.000 M ² Tenaga kerja : 12 Rencana produksi komersia : Kontak poin : (0386) 2222843/fax (0386) 214000	31.250.000.000	Ijin PM : 23444/II/PI/PTA/2013 Tgl 10-12-2013 Ijin daerah : tahap proyek : Masih dalam proses	Masih dalam proses pengurusan ijin lokasi, SITU, TDP, Ijin Lokasi dan pengesahan akte di Kementerian Hukum dan HAM untuk sementara belum ada	Dilakukan koordinasi yang efektif dengan Pemerintah Kabupaten
11	NAMA PERUSAHAAN : PT. Cendana Indopearls Jenis proyek : Budidaya Kerang Mutiara Lokasi : Jl Kua RI05/Rw Kel. MoruKec. Abad Kab. Alor Status : Bidang usaha : Budidaya Kerang Mutiara Produksi : Lahan : Tenaga kerja : 102 Rencana produksi komersia : Kontak poin : 0361-284455/0361284454	30.879.800.000	Ijin PM : 229/T/Pertanian.1997.Tgl 29-5-1997 APIP : No. 180900914-B Tgl. 19 September 2012 RPTKA : No.KEP.05226/PTK/PTA/2013 Tanggal 26 Maret 2013 SITU : 503/432/2010, Tgl. 14-9-2010 Rekomendasi Bupati : DKP/624/VI/2013 Tgl.10-7-2013 Rekomendasi DPLH : BLHD.660.1/685/II/XII/2010, Tgl 23-12-2010 SK hak Atas Tanah/Sertifikat : HOB No.03 Tgl.14-11-1996 IMB : HGP No.02, Tgl. 14-11-1996 : 286/HK/SKEP/1996	Masalah pertanahan yang selalu berbenturan dengan oknum personal tetapi dari perusahaan berusaha melakukan proses penyelesaian tanah dengan proses komunikasi yang baik supaya tidak terjadi berbenturan dengan masyarakat setempat	Dupayakan mediasi oleh Pemerintah Kabupaten antara masyarakat dan perusahaan
12	NAMA PERUSAHAAN : PT. TIMOR OTZUKI MUTIARA Jenis proyek : Budidaya mutiara dan pembibitan Lokasi : Selat Semau - Kupang Status : PMA Bidang usaha : Budidaya mutiara dan pembibitan Produksi : Kerang Mutiara / 11,672,4)Anak Kerang mutiara / 450.000 Lahan : Tenaga kerja : 367 Rencana produksi komersia : Kontak poin : 0380 - 890222 / 0380 - 8903555	43.750.000.000	Ijin PM : 851/T/PERIKANAN/2000	Masalah keamanan Masalah pembangunan PLTU yang dekat dengan lokasi budidaya .	Telah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan kedua pihak untuk penentuan batas wilayah eksplorasi

NO	PROYEK INVESTASI	Nilai Investasi	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4	5	6
13	NAMA PERUSAHAAN : PT. AGB MINING -Jenis proyek : Industri pembuatan logam dasar bukan besi -Lokasi : Benu Kec. Takari, Kab. Kupang -Status : PMDN -Bidang usaha : Industri pembuatan logam dasar bukan besi -Produksi : - Ingot mangan, Silicon mangan -Lahan : 100.000 M2 -Tenaga kerja : 40 -Rencana produksi komersial : 4.000.000 -Kontak poin : 0380 - 823625/ 62380- 829769	63.750.000.000	No. IPI/Tgl : 192/1/PP/PMDN/2014	Masih terlambatnya realisasi pelaksanaan investasi dari target yang ditentukan	Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan investasi
14	NAMA PERUSAHAAN : PT. Komodo Dragon -Jenis proyek : Jasa akomodasi dan penyedia jasa sarana wisata tirta -Lokasi : Pasir Putih, Kec. Komodo- Kab. Manggarai Barat -Status : PMA -Bidang usaha : PARIWISATA -Produksi : -Lahan : 60.000M ² -Tenaga kerja : 56 -Rencana produksi komersial : 50 kamar, - Wisata tirta : US\$ 700.000 -Kontak poin : 081353322373	31.875.000.000	No. Ijin Usaha/Tanpaal : 1874/II/PPMA/2009, Tgl.31-12-2009 SITU : KPPT.503/200/XI/2014, Tgl.16-6-2014 SUP : BPPMPT.570./188/VI.2014, Tgl. 16 -6-2014 RPTKA (Non perizinan) : 569.a/08/KPPTSP/2014 Tg. 6 -6-2014	Sda	Sda
15	NAMA PERUSAHAAN : PT. BALI ISLAND REALITY -Jenis proyek : PARIWISATA -Lokasi : Boao, Oenggau, Oelolot-Kab. Rote Ndao -Status : PMA -Bidang usaha : Jasa Akomodasi (Cottage) -Produksi : -Lahan : -Tenaga kerja : 3 -Rencana produksi komersial : -Kontak poin : 0381-282821	31.250.000.000	No. SP /Tgl : 20/1/PP/II/PPMA/2010, Tgl 24/02/2010 Ijin Lokasi : 150/KEP/HK/2012, Tgl. 11 Mei 2012 Ijin Gangguan/HO : 123/055.504/V/2013, Tgl. 17 Mei 2013	Sda	Sda

NO	PROYEK INVESTASI	Nilai Investasi	Kondisi Saat Ini	Pernmasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Pernmasalahan
1	2	3	4	5	6
16	NAMA PERUSAHAAN : PT. TIMOR MITRA NIAGA -Jenis proyek : PERKEBUNAN -Lokasi : Kec. Lamboya Barat Kab. Sumba Barat -Status : PMDN -Bidang usaha : Perkebunan Kakao -Produksi : -Lahan : -Tenaga kerja : 375 ORANG -Rencana produksi komersial : -Kontak poin : 0380-832169/0380-831354	5.848.568,704	No. Ijin Prinsip /Tgl : No.719/1/PMDN/1991, Tgl 20 -11- 1991 Ijin Lokasi : No. 04 Thn 1998 Tanggal 20 Mei 1998 SK Hak Atas : No. 46/HGU/BPN/1994 Tgl. 5-08-1994 Tanah Jenis Non Perizinan : No. 135/KMK.05/2000 Tgl. 1 Mei 2000	- Jalan dari waikabubak menuju lokasi kebun sejak pengaspalan sejak tahun 1998 sudah rusak berat dan hincua saat ini belum - Kurangnya tenaga kerja setempat yang siap pakai	Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan investasi
17	NAMA PERUSAHAAN : PT. SUMBA INDUSTRIAL LIVESTOCK -Jenis proyek : PETERNAKAN -Lokasi : Anakalang Kec. Katikutana Kab. Sumba Tengah -Status : PMA -Bidang usaha : Pembibitan dan budidaya sapi potong -Produksi : Sapi potong -Lahan : 61.000 Ha -Tenaga kerja : 67944 ORG -Rencana produksi komersial : 250.000 ekor -Kontak poin : 021-570444/021-5702373	10.843.750.000,000	No. Izin Prinsip/Tgl : No. 2503/1/PP.PMA/2013 Tgl. 20-12-2013	Masih terlambatnya realisasi pelaksanaan investasi dari target yang ditentukan	Sda
18	NAMA PERUSAHAAN : PT. ASA MUTIARA NUSANTARA -Jenis proyek : KELAUTAN -Lokasi : Desa Nurri, Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur -Status : PMA -Bidang usaha : Budidaya Mutiara -Produksi : Round pearl, Seedless Pearl -Lahan : -Tenaga kerja : 84 orang -Rencana produksi komersial : -Kontak poin : 021-31908535/021-21908537	56.225.000,000	No. Izin Perluasan : 378/1/IIU-PB/PMA/2013 (16-9-2013)	Sda	Sda

NO	PROYEK INVESTASI	Nilai Investasi	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah-Langkah Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4	5	6
19	<div><div>NAMA PERUSAHAAN</div><div>: PT. Shandong Minerals Exploration And Testing</div><div>Jenis proyek</div><div>: Pertambangan Umum</div><div>Lokasi</div><div>: Batu Gosok dan Tobedo Kabupaten Manggarai Barat</div><div>Status</div><div>: PMA</div><div>Bidang usaha</div><div>: Jasa penunjang Pertambangan Umum dan Perdagangan ekspor import</div><div>Produksi</div><div>:</div><div>Lahan</div><div>:</div><div>Tenaga kerja</div><div>: 12 ORG</div><div>Rencana produksi komersial</div><div>: 021-23585719</div><div>Kontak poin</div><div>:</div></div>	21.250.000.000	<div>No. SP /Tgl</div> <div>: 46/1/II/III/PM/2012 (30-1-2012)</div> <div>RPTKA</div> <div>: No. KEP 17977/PTK/PTA/2008 (26-11-2008)</div>	Masih terbambatnya realisasi pelaksanaan investasi dari target yang ditentukan	Adanya kegiatan pemantauan dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan investasi

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

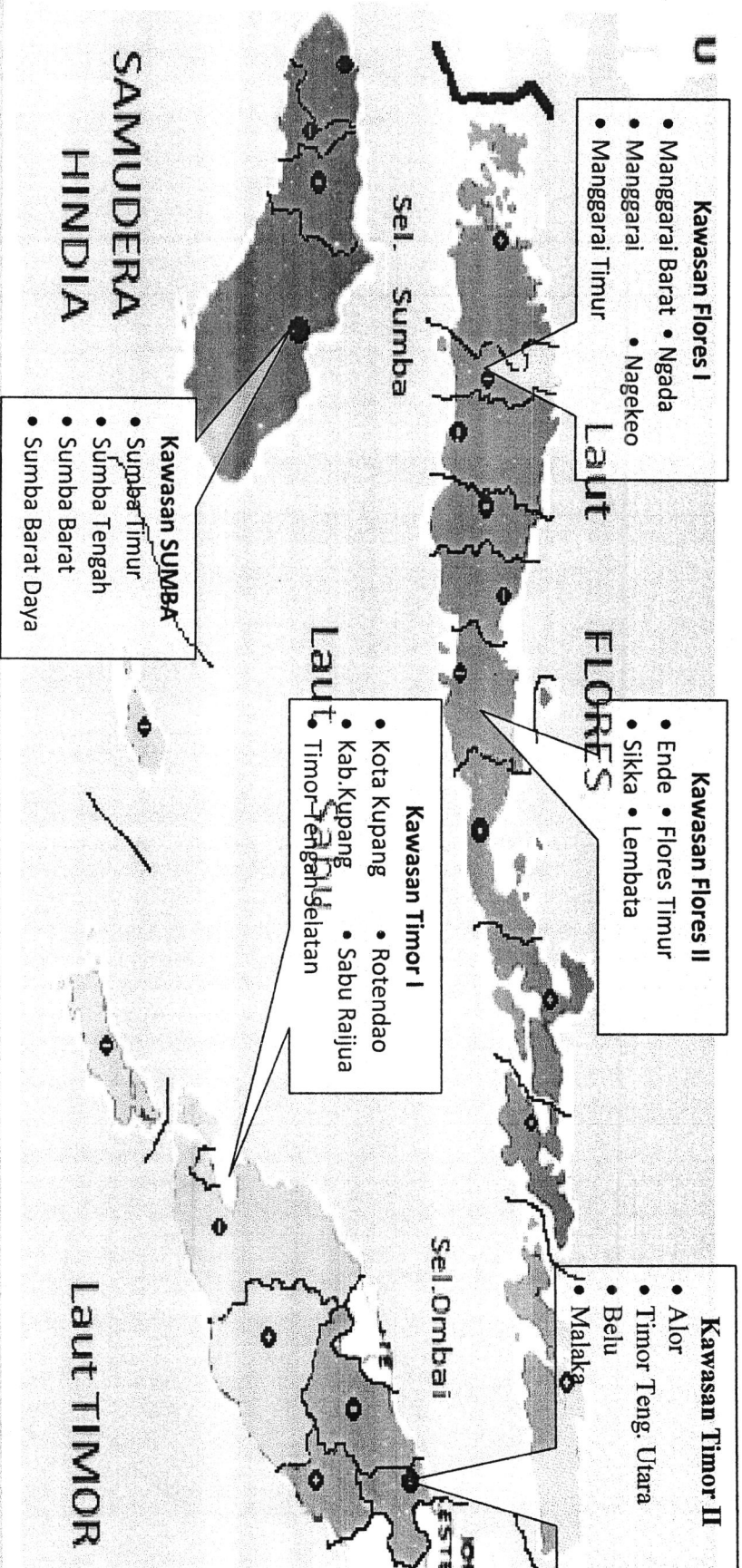

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN E : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 10 - 2 - 2016

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN INVESTASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBUKAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2016
TANGGAL : 10 Februari 2016

[illegible]

No	SEKTOR/ BIDANG INVESTASI	KETERSEDIAAN POTENSI KOMODITI PER KABUPATEN/KOTA																						
		MABAR	M.BAI	MATIM	NGADA	NG.KEO	ENDE	SIKKA	FLOTIM	LEMBATA	SU.TIM	SU.TENG	SU.BAR	SUBADA	KOTA KPG	KAB.KPG	TTS	RONDA	SARAI	TTU	BELU	MALAKA	ALOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	d cengkeh	V	V	V	V		V			V														
	e gula tebu / aren					V	V	V			V	V	V	V		V	V	V		V				
	f jambu mete				V		V	V	V	V	V			V		V	V			V				
	g kemiri				V	V				V	V	V				V	V	V		V	V	V		
	h sagu									V	V	V				V	V	V		V	V	V		
	2 Usaha Kehutanan																							
	a Kayu Jati				V	V	V		V								V	V		V	V	V		
	b kayu Cendana										V		V	V			V	V		V	V	V		
	c kayu Mahoni					V	V			V		V	V				V	V		V	V	V		
	d kayu Pinus				V	V	V	V									V	V		V	V	V		
	e kayu merah			V		V	V	V	V								V	V		V	V	V		
	f Rotan			V	V			V									V						V	
	g Minyak Kayu Putih																							
	h tanaman hias			V	V			V				V			V		V							
	F SEKTOR PARIWISATA																							
	1 tempat wisata	V	V		V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V		
	2 hotel dan penginapan	V	V		V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V		
	3 budaya tradisional	V	V		V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V		
	4 kesenian daerah	V	V		V	V	V	V	V	V	V		V	V	V	V	V	V		V	V	V		
	H SEKTOR PERTAMBANGAN																							
	1 Mineral Radioaktif		V				V		V		V		V							V		V		
	2 Mineral Logam		V		V		V	V		V	V						V	V		V		V		
	3 Mineral Bukan Logam																						V	
	4 Batuan																							
	5 Batubara	V	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
	I SEKTOR JASA KREATIF LAINNYA																							
	1 Transportasi	V					V	V	V	V	V			V	V	V			V		V			
	2 Komunikasi massa	V				V		V	V	V	V		V	V	V	V								
	3 konstruksi dan bangunan	V	V				V	V	V		V				V	V	V					V		
	4 keuangan dan perbankan	V			V		V	V		V	V	V		V	V	V	V					V		
	5 industri pengolahan dan kuliner	V				V	V															V		
	6 industri penunjang pertanian								V		V			V	V	V	V			V				
	7 Aneka tekstil	V	V			V	V	V			V			V	V	V	V			V				
	8 jasa kreatif lain-lain	V	V	V	V	V	V		V	V	V		V	V	V	V	V			V				

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA